



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



f i d disnakeswankaltim

x disnakkaltim

Dinas Peternakan
dan Keswan Kaltim



peternakan.kaltimprov.go.id



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah- Nya akhirnya penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Peran pemerintah bersifat stimulus atau pengungkit khususnya dalam rangka revitalisasi pertanian untuk mendorong tumbuhnya agribisnis peternakan, sehingga perkembangan peternakan tidak terlepas dari peran serta masyarakat peternakan sebagai pelaku usaha. Untuk itu diperlukan rencana kerja yang sinergi dan difasilitasi oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur , terutama dalam upaya kecukupan daging dan penyediaan komoditas peternakan lainnya , pemberdayaan ekonomi pedesaan serta memanfaatkan peluang pasar komoditas peternakan.

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	74
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	89
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	89
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	91
3.3. Program dan Kegiatan	92
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	101
BAB V PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2025	6
Tabel 2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2024.....	34
Tabel 3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023.....	35
Tabel 4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging.....	36
Tabel 5 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2024.....	36
Tabel 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	38
Tabel 7 Dukungan Anggaran Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Ternak Tahun 2026	49
Tabel 8 Dukungan Anggaran Kegiatan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul Tahun 2026	50
Tabel 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur.....	51
Tabel 10 Usulan Aspirasi Langsung Kabupaten Kota.....	74
Tabel 11 Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD	77
Tabel 12 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	92
Tabel 13 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	92
Tabel 14 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Kalimantan Timur	102

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan periode 2025-2029 yang memuat rancangan awal kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Tahun 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang telah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- b. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari misi, tujuan, sasaran dan program kegiatan dan sub kegiatan perenagkat daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Rencana kerja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026

- d. Rencana kerja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak penyusunan rencana kerja hingga penetapan dokumen rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran output dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang – bidang di rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian program/kegiatan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang diharapkan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah:

1. Terjabarkannya Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusun Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangaunan selama 1 (satu) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan tahun pertama periode Renstra Tahun 2024-2026 yang melaksanakan 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Gambaran hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur											
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian	Indeks	96,88	-	93,3	93,3	100	95,17	44,85	47,13
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	-	100	100	100	100	100	100,00
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	94	-	90	90	100	92	43	46,74

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Skor	92	80	90	90	100	91	39,4	43,30
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	%	86	-	80	80	100	83	30,5	36,75
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	86	80	80	80	100	83	30,68	36,96
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	86	80	80	80	100	83	30,68	36,96
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	86	80	80	80	100	83	38	45,78
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	86	71	80	80	100	83	41,5	50,00
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	86	80	80	80	100	83	51	61,45

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	97,3	-	96,21	95,53	99,29	97,29	24,03	24,70
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,46	-	87,53	98,2	112,19	88	64,92	73,77
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	725	-	625	625	100	660	0	0,00
		Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah, Milyar	970	-	860	858	99,77	920	525	57,07
		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	435	-	385000	328554	85,34	410000	0	0,00
		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	58,2	-	37,04	37,04	100,00	47,62	0	0,00
		Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	29	-	25	25	100,00	27	7,46	27,63
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan	Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	280	-	175	175	100,00	225	175	77,78
		Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nuthfa)	UnitUsaha	130	-	108	113	104,63	119	108	90,76

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,75	-	1,95	0,29	14,87	1,85	1,37	135,04
		Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13,5	-	12,5	13,43	107,44	13	10,13	77,92
		Persentase Calving Rate	%	62	-	61	55	90,16	61,5	23	37,40
		Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	72	-	50	50	100,00	61,5	50	81,30
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	42	-	18	18	100,00	31	17	54,84
		Luasan HPT	Ha	1.250	-	1150	1133	98,52	1225	1172,5	95,71
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	65	-	29,58	29,58	100,00	47	36,84	78,38
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	Jumlah Pengadaan Ternak	Indukan / Bibit	7200	-	2700	3527	130,63	4700	2700	57,45

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	Daerah Provinsi Lain										
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,8	-	99,54	100	100,46	99,72	83,94	84,18
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	5	-	3	3	100,00	4	3	75,00
		Jumlah Nilai Akses pembiayaan	MilyarRupiah	133	-	134	139	103,73	120	22	18,33
		Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	158	-	107	153	142,99	155	143	92,26
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,45	-	91,79	95,41	103,94	92,41	76,7	83,00
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	97,75	-	95,11	100	105,14	95,81	78,76	82,20
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	72	-	64	76	118,75	68	56	82,35
		Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	49	-	43,5	50,13	115,24	45,8	28,5	62,23

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	26	-	20	20,39	101,95	68	56	82,35
		Tingkat kesembuhan GANGREP	%	83	-	76,5	98,4	128,63	80	44,64	55,80
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	88	-	72	76	105,56	80	44,44	55,55
		Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	2,4	-	3,2	5,28	60,61	2,85	2,19	130,14
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting	gram per hari	33,6	-	27,5	27,5	100,00	30,5	0	0,00
		Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	47	-	23	23	100,00	36	17	47,22
		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang	%	91	-	81	95,23	117,57	86	100	116,28

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
		memenuhi persyaratan (ASUH)									
		Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif	%	22	-	24,48	24,78	98,79	23,5	23,8	98,74
		Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,5	-	1,32	1,38	104,55	1,41	0,33	23,40
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	65	-	58	75,8	130,69	60	61,16	101,93
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,73	-	99,35	100	100,65	99,59	87,24	87,60
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	139	-	114	122	107,02	126	124	98,41
		Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	100	-	32,9	32,9	100,00	65,8	28	42,55

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,78	-	99,74	99,99	100,25	99,73	43,56	43,68
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	49.530	-	49215	49190	99,95	49310	59	0,12
		Jumlah peternak milenial	Orang	125	-	75	75	100,00	100	20	20,00
		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	Rasio	1,139	-	1,154	1,154	100,00	1,146	0	0,00
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	11	-	9	9	100,00	13	9	69,23
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	Indeks	96,88	-	93,3	93,3	100,00	95,17	33,31	35,00
		Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	%	100	-	100	100	100,00	100	100,00	100,00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Score	92	-	90	90	100,00	91	25,00	27,47
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	86	-	80	80	100,00	83	21,00	25,30

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	83,00	100,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	86	80	80	80	100,00	83	21,00	25,30
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	99	-	88,54	89,12	100,66	98,73	65,25	66,09

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	angka kelahiran	%	27	-	25,5	38	149,02	26,1	14	53,64
		Angka kematian ternak	%	1,97	-	2,13	3,5	60,86	2,05	1,5	136,67
		Calving Interval	Bulan	16,3	-	17,01	14	82,30	16,66	12	72,03
		Jumlah PAD	Rupiah	127000000	-	113000000	204088000	180,61	120000000	84248000	70,21
		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	204,5	-	133,7	187,5	140,24	194	184,94	95,33
		Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/pols	20.000	-	10000	273960	2739,60	15000	20800	138,67
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1.850	-	1500	1501,28	100,09	1800	848	47,11
		Jumlah produksi pupuk	Ton	25	-	10	13,55	135,50	20	13,7	68,50
		Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	10	-	0	0	0,00	5	0	0,00
3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner											
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	96,88	-	93,3	93,3	100,00	95,17	43,6	45,81
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100	-	100	100	100,00	100	100	100,00
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Score	92	-	90	90	100,00	91	40,79	44,82

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Score	86	80	80	80	100,00	83	19,31	23,27
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Score	86	80	80	80	100,00	83	34,09	41,07
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	86	80	80	80	100,00	83	26,98	32,51
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	83	100,00
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	86	80	80	80	100,00	83	27,01	32,54
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	86	80	80	80	100,00	83	34,47	41,53
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	99,44	-	98,68	100	101,34	99,18	62,5	63,02

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan kegiatan Renja SKPD Tahun 2025 Triw. II	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2025 Triw. II
1	2	3		4	7	9	10	11 = 10/9*100	12	13	14 = 13/12*100
	MASYARAKAT VETERINER										
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Jumlah PAD	Rupiah	235000000	-	190000000	641622000	337,70	212000000	58865000	27,77
		Peningkatan Kepuasan pelanggan	Score	88,31	-	84	95,05	113,15	86	90,53	105,27
		Peningkatan Ruang lingkup pengujian	Absolut	50	-	39	39	100,00	45	20	44,44

Tabel 1.1

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program pada Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 2 (dua) outcome, Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti. Realisasi Capaian Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti pada Dinas dan UPTD mencapai 100% yang berarti layanan kesekretariatan berjalan sesuai dengan prosedur dan keluhan pengguna layanan telah seluruhnya ditindaklanjuti, program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu dengan capaian 90% dari target 90% atau capaian 100%. Terdapat 18 dokumen yang disusun tepat waktu dari 20 dokumen. Dokumen yang telah disusun tepat waktu adalah RENSTRA 2024-2026, RENJA 2024, Perjanjian Kinerja, IKU 2024-2026, DPA, RKA, Rencana Aksi, Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja dan Casecading, LHE dan TLHE AKIP, Laporan monitoring dan evaluasi (Renja, Renaksi, PK), SOP, IKI, dan Pengukuran Kinerja.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran Skor 90 dari target 90 skor, dengan capaian realisasi keuangan seluruh Dinas dan UPTD menurut konsolidasi Bersama BPKAD per 31 Desember 2024 adalah 93,03%, terdapat selisih perbedaan dari aplikasi SIPD dan aplikasi SIRA pada hasil akhir realisasi keuangan. Aplikasi SIPD 93,03% SIRA 92,58%.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Realisasi capaian Indikator Tingkat Pengelolaan administrasi BMD 80% dari target 80%. Pada tahun 2024 terdapat 181 barang yang masuk daftar usul pemusnahan atau penghapusan BMD berupa alat dan mesin.

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Realisasi Tingkat Pengelolaan kepegawaian 80 Skor dari target 80 Skor. Terdapat 31 orang pegawai dinas yang mengikuti peningkatan SDM
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum 80% dari target 80% atau capaian 100%, sehingga administrasi umum berjalan dengan baik selama tahun 2024
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah 80% dari target 80%. Dinas Peternakan memiliki jumlah BMD asset tetap 1828 dan BMD aset lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80% dari target 80%. Pada Tahun terdapat 1259 naskah surat masuk dan 1201 naskah surat keluar
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi capaian Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik 80% dari target 80%

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan penilaian SAKIP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2026
- 2) Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut
- 3) Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut
- 4) Kurangnya pelatihan dan pemahaman staf tentang kebijakan administrasi umum dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan
- 5) Kurangnya pemahaman dan pelatihan staf tentang regulasi pengadaan daerah dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pengadaan

- 6) Ketidakmampuan untuk menyediakan dukungan keuangan yang memadai dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan jasa penunjang urusan
- 7) Ketidakcukupan anggaran untuk pemeliharaan dapat membatasi kemampuan untuk menjaga dan memperbaiki barang milik daerah secara teratur

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penerapan teknologi informasi yang memadai telah memudahkan pengukuran dan pemantauan indikator kinerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
 - 3) Keberadaan kebijakan dan prosedur kepegawaian yang jelas dan terstandarisasi
 - 4) Penerapan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan
 - 5) Adanya kebijakan yang jelas dan mendukung dalam pengadaan barang milik daerah
 - 6) Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan
 - 7) Pengelolaan inventaris BMD yang baik
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki 3 (tiga) outcome Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis, Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan dan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Adapun realisasi masing-masing outcome adalah sebagai berikut:

- a. Capaian outcome Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu 99,29%. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan

Agribisnis mendapat skor 95,53 dari target skor 96,21. Kegiatan yang mendukung outcome tersebut yaitu Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian mempunyai indikator sebagai berikut:

- Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi
Capaian kinerja indikator jumlah keluarga miskin terfasilitasi adalah 625 KK atau 100% dari target 625 KK, pada Tahun 2024 terdapat penambahan KK yang terfasilitasi sebanyak 60 KK dari kondisi awal Tahun 2023 565 KK, 60 KK tersebar di 2 Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Bontang.
- Jumlah Nilai Pengeluaran Komoditas Ternak
Capaian kinerja indikator jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak adalah 858 Miliar Rupiah atau 99,77% dari target 860 Miliar Rupiah terdapat penambahan nilai pengeluaran komoditas 25 Miliar Rupiah, yang didapatkan dari komoditas Sarang Burung Walet sebesar 145,795 kg
- Jumlah Produksi Pupuk Asal KOHE
Capaian kinerja indikator jumlah produksi pupuk asal KOHE adalah 328.544 ton dari target 385.000 ton atau 85,34%. Perhitungan Pengolahan Kotoran Hewan (KOHE) didapatkan dari populasi Tahun 2023 dan Pengadaan Ternak Tahun 2024 (Sapi 10.757 ton, Kambing 6.375 ton dan Unggas 311.411 ton)
- Persentase Pemanfaatan Jumlah Biogas
Capaian kinerja persentase pemanfaatan jumlah biogas pada Tahun 2024 adalah 37,04% dari target 37,04% atau 100%. Fasilitasi revitalisasi dan kantong biogas sebanyak 20 unit di 5 kelompok yaitu : KT. Maju Bersama (Paser), KT. Trubus Kencana (Paser), KT. Sabar Subur (Paser), KT. Sinar Tani (Paser), KT. Rawa Buah (Paser)
- Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan
Capaian kinerja indikator persentase kapasitas usaha pengolahan 25% dari target 25% atau 100%. Capaian mengalami peningkatan Tahun 2024 90 pelaku usaha menjadi 115 pelaku usaha.

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran Ijin Edar Makanan Dalam (MD)/PiRT sudah tidak memungut biaya dari pelaku usaha sehingga anggaran tidak terealisasi
- 2) Uji Laboratorium Produk Akhir mendapatkan kuota gratis uji lab dari BPOM
- 3) Sulitnya mendapatkan rekomendasi Alat Sarana Pengolahan Daging yang bersertifikat SNI
- 4) Kurangnya Proposal expo/pameran dalam dan luar daerah
- 5) Beberapa kelompok ternak telah berhasil menjual produk ternak mereka, namun masih ada kendala dalam hal pemasaran. Belum adanya offtaker dalam membeli ternak menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh peternak

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut:

- 1) Dukungan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dalam mendukung terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana pertanian
 - 2) Dukungan dan Komitmen Kelompok Tani/Ternak Penerima Bantuan sarana dan prasarana pertanian demi kelancaran pelaksanaan kegiatan
- b. Capaian outcome Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu 112,19%. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan mendapatkan skor 98,20 dari target skor 87,53. Tercapainya Outcome Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung oleh 4 kegiatan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Kegiatan ini memiliki indikator yang mendukung program sebagai berikut:
 - Realisasi capaian kinerja jumlah bibit sapi yang ber-SKLB

sebanyak 175 ekor dari target 175 ekor atau telah terealisasi 100%. Bibit sapi yang ber-SKLB berada di Kabupaten Paser dan Kabupten Penajam Paser Utara.

- Realisasi capaian kinerja jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nuthfa) sebanyak 113 unit usaha dari target 108 unit usaha atau 104,63% yang tersebar di 7 (tujuh) Kab/Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Paser, Berau dan Samarinda.
 - Jumlah DOC yang kualitasnya dibawah standar mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 0,29% dengan realisasi capaian kinerja 185,13%. Data DOC berasal dari Perusahaan Kemitraan dan Peternak di Kab/Kota Kutai Kartanegara, Berau dan Balikpapan.
 - Persentase Akseptor IB dari indukan mencapai 13,43% dari target 12,50% atau realisasi sebesar 107,44%. Realisasi 13,43% merupakan hasil dari 2114 ekor betina produktif yang dilakukan IB dari total indukan 15.743 ekor indukan
 - Pada Tahun 2024 Persentase Calving Rate mencapai 55% dari target 61%. Calving rate adalah persentase keberhasilan kelahiran dari jumlah induk yang dikawinkan atau yang tersedia untuk beranak dalam periode tertentu. Semakin tinggi calving rate, semakin baik tingkat reproduksi ternak. Realisasi Kelahiran pada Tahun 2024 adalah 1635 ekor dari ternak yang kawin IB dan kawin alam.
 - Terdapat 50% closed house yang telah di upgrade pada tahun 2024 dari target 50% atau realisasi capaian 100%. Kandang closed house tersebar di 5 (lima) Kab/kota yaitu Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara dan Samarinda.
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan

Realisasi jumlah pengolahan pakan, bank pakan sebanyak 18 unit dari target 18 unit atau 100% yang telah diberikan ke 9 (Sembilan) Desa Korporasi Ternak di 8 (delapan) Kab/kota.

- Luasan HPT

Luasan HPT pada Tahun 2024 realisasi mencapai 98,52 seluas 1.133 Ha dari target 1.150 Ha. Luasan HPT didukung dengan aktifitas penanaman HPT di 9 (Sembilan) Kab/Kota Balikpapan, Samarinda, Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Bontang dan Penajam Paser Utara

3) Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman realisasi mencapai 29,58% dari target 29,58%. Terdapat 15 unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu dari 60 unit usaha yang dibina atau dilakukan pengawasan.

4) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain memiliki indikator jumlah pengadaan ternak, realisasi kinerja jumlah pengadaan ternak pada tahun 2024 berjumlah 3.527 indukan/bibit dari target 2.700 indukan/bibit. Jenis ternak pengadaan adalah sapi bali sebanyak 1.186 ekor, kambing jawarandu sebanyak 361 ekor, ayam lokal 1240 ekor dan itik 740 ekor. Penyebaran ternak sapi dilakukan di kab/kota Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Samarinda kepada 42 kelompok ternak, untuk ternak kambing dilakukan penyebaran di kab/kota Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan Berau ke 9 kelompok ternak, penyebaran ternak unggas dilakukank kepada 16 kelompok ternak untuk kab/kota Paser, Penajam Paser Utara dan Bontang.

c. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mencapai skor 89,12 atau 100,66% dari target skor 88,54. Tercapainya Outcome Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung oleh 1 kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan dari UPTD Pembibitan Hijauan Pakan Ternak (PTHPT) yang mendukung sasaran meningkatnya pangan asal ternak, didukung oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- Angka Kelahiran

Realisasi angka kelahiran kinerja tahun 2024 mencapai 38% dari target 25,50%. Selama tahun 2024 di UPTD PTHPT jumlah kelahiran ternak Sapi Bali sebanyak 29 ekor (Jantan 15 ekor dan Betina 14 ekor). Selain ternak sapi terdapat 2 ekor Rusa Sambar Betina, sehingga total kelahiran di UPTD PTHPT berjumlah 31 ekor.

- Angka kematian ternak

Kematian ternak di UPTD PTHPT sebanyak 3,50% dari target 2,13% semakin rendah presentase maka semakin baik realisasi kinerja.

- Calving Interval

Realisasi kinerja calving interval mencapai 14 bulan dari target 17,01 bulan dengan capaian yang sangat baik. Namun implikasi calving interval 14 bulan berarti efisiensi reproduksi kurang optimal, karena sapi tidak beranak setiap tahun. Ideal calving interval adalah ≤ 13 bulan, lebih pendek jarak dua kelahiran berturut semakin baik reproduksi ternak. Faktor yang mempengaruhi jarak beranak adalah post partum estrus (PPE), post partum mating (PPM), dan S/C. Penyebab CI menjadi panjang karena terlambatnya kawin pasca melahirkan, kawin berulang dan kegagalan memelihara kebuntingan hingga lahir. Semakin lama PPE dan PPM serta tingginya nilai S/C maka jarak beranak akan semakin lama pula. Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap baik apabila jarak antar kelahiran tidak melebihi 12 bulan atau 365 hari.

- Jumlah PAD

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp204.088.000 di tahun 2024 atau 181% dari target Rp113.000.000 dengan rincian Retribusi Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggarahan Villa pada pemakaian mess, gedung pelatihan, guest house, pemakaian rumah dinas sebesar Rp7.600.000, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada retribusi karcis masuk sebesar Rp16.451.000 dan Retribusi Penjualan Hasi Produksi Usaha Pemerintah daerah pada penjualan ternak bibit, ternak non bibit, bibit HMT, dan pupuk kandang sebesar Rp180.637.000

- Jumlah Populasi Ternak/Hewan

Populasi ternak pada tahun 2024 mencapai 187,50 ST dari target 133,70 ST atau realisasi capaian 140%. Pada UPTD PTHPT populasi Rusa Sambar 205 ekor, Sapi Bibit 4 ekor, Sapi Bali 123 ekor, Bull 4 ekor, Ayam (Kampung dan Nunukan) 285 ekor, Ayam (KUB, Merawang, Arab) 865 ekor

- Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi

Produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi sebanyak 273.960 stek/pols tersebar diKab/kota Penajam Paser Utara, Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser dan Bontang. Jenis rumput yang didistribusikan antara lain Gama Umami (164.040 stek/pols), Pakchong (50.180 stek/pols), Zanzibar (24.330 stek/pols), Biograss (6.100 stek/pols), Paspalum (600 stek/pols), Rumput Odot (2.550 stek/pols), Brachiaria Humidicola (23.850 stek/pols), Taiwan Grass (250 stek/pols) dan Setaria (2.060 stek/pols).

- Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan

Produksi HPT dan pakan tambahan mencapai 1.501,28 ton dari target 1.500 ton. Produksi HPT yang dihasilkan adalah Rumput BH (1.174.994 kg), Rumput Gajah (29.475 kg), Pakchong, Zanzibar, Gama Umami dan Pakan Olahan.

- Jumlah produksi pupuk

Produksi pupuk pada tahun 2024 mencapai 13,55 ton dari target 10 ton. Produksi pupuk yang dihasilkan berupa pupuk padat, pupuk cair dan pupuk urine

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Rata-rata capaian pada Program penyediaan dan pengembangan prasarana yaitu 109,44% dengan capaian keuangan mencapai 97,62% atau Rp. 5.079.227.884,00,- dari Rp5.203.314.220,00,-. Capaian outcome dari program ini adalah Tingkat pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi skor 100 dari target 99,54 skor atau 100,46%. Program ini didukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator sebagai berikut:

- Jumlah Investasi di Bidang Peternakan

Realisasi jumlah investasi dibidang peternakan sebanyak 3 unit dari target 3 unit atau 100% yaitu dengan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan komoditas sapi potong, kambing, ayam di Kabupaten Kutai Kartanegara, PT. Multi Harapan Utama komoditas sapi potong di Kabupaten Kutai Kartanegara dan PT. Gunta Samba komoditas sapi potong di Kabupaten Berau.

- Jumlah Nilai Akses pembiayaan

Realisasi akad kredit dan jumlah debitur pada tahun 2024 sub sektor peternakan mencapai 554 debitur dengan akad kredit Rp51.097.900.000. Realisasi capaian mencapai 153 Miliyar Rupiah atau 142,99% dari target 107 Miliyar Rupiah

- Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan

Kawasan pemanfaatan untuk peternakan mencapai 139 Ha dari target 134 Ha atau 103,73% di 10 (sepuluh) Kab/kota.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki 3 (tiga) outcome yaitu Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ, Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner dan Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat. Adapun realisasi masing-masing outcome adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Outcome Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ dan Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat. Realisasi capaian Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ mencapai skor 95,41 dari target 91,79 skor atau 104%. Capaian outcome pada program ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi didukung oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut)

Realisasi capaian wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ yaitu 76 kecamatan dari target 64 kecamatan atau sebesar 119%. Kasus terjadi di Kecamatan Loa Janan, Tenggara Seberang dan Sambutan dan Samarinda Kota, Bontang Barat, Teluk Pandan, Balikpapan Selatan, Tabang, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Kongbeng, Samarinda Ulu, Bontang Utara, Palaran (tw3), Tanjung Redeb, Tumbit Dayak, Bumi Jaya, Waru, Rantau Pulung, Karangan, Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Muara Wahau, Tanah Grogot, Samarinda Utara, Samboja.

- Persentase pelayanan kesehatan hewan

Pelayanan kesehatan hewan pada tahun 2024 mencapai 50,13% dari target 43,50% atau 115%. Pelayanan Kesehatan hewan tahun 2024 sebanyak 107.000 layanan.

- Tingkat kesembuhan GANGREP

Realisasi capaian tingkat kesembuhan gangguan reproduksi mencapai 98,40% dari target 76,50% atau 129% dengan total kasus 125 dan tidak sembuh 2 kasus. Pada triwulan I terdapat 14 kasus di Kab/Kota Kutai Kartanegara dan Samarinda dan sembuh seluruhnya. Triwulan II kasus terdapat 39 dan terdapat

1 kasus yang tidak sembuh/culling 1 ekor, kasus terjadi di Kab/kota PPU, Balikpapan, Paser, dan Kukar. Triwulan III terdapat 48 kasus dan sembuh seluruhnya di Kab/kota Paser, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau dan Kukar. Triwulan IV terdapat 24 kasus dan tidak sembuh 1 kasus

2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

- Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan

Realisasi capaian kinerja mencapai 76,60% dari target 72% atau 106,39%. Persentase kepatuhan terhitung dari jumlah kumulatif iSIKHNAS sebanyak 7.244 dibagi dengan jumlah frekuensi lalulintas ternak sebanyak 9.457

- Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ

Realisasi capaian penurunan resiko masuknya PHMSZ

adalah 5,28% dari target 3,20%.

b. Capaian outcome Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu 100 dari target 95,11 atau 105,14%. Kegiatan yang mendukung capaian outcome pada program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yaitu:

- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis dengan capaian 20,39% dari target 20% mendapatkan persentase kinerja 101,95%. Indikator berikut memiliki aktifitas Komunikasi, Infomasi dan Edukasi (KIE) Penyakit Zoonosis yang dilakukan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebanyak 21 Kali kepada siswa sekolah dan Masyarakat umum. Aktifitas dilakukan pada 6 (enam) Kab/Kota Samarinda, Kutim, Kubar, Paser, Balikpapan dan

Penajam Paser Utara

2) Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan mempunyai indikator sebagai berikut:

- Jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting
Realisasi kinerja jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting yaitu 27,50 gram per hari dari target 27,50 gram per hari atau persentase 100%. Aktivitas yang dilakukan terkait pemenuhan konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting kepada 2 (dua) Kota adalah pemberian telur ayam di kota Bontang sebanyak 12000 butir, Kota Samarinda 12000 butir. Telur ayam yang didistribusikan selama 60 hari berupa telur rebus masing-masing kota 200 orang, pemberian daging ayam dan daging giling pada 400 orang selama 2 bulan sebanyak 720 kg.
- Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)
Realisasi kinerja Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) adalah 95,23% dari target 81% persentase kinerja 117,57%. Total sampel yang diuji selama Tahun 2024 yaitu 1170 sampel dan 1114 sampel yang memenuhi persyaratan.
- Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif
Realisasi kinerja Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif yaitu 24,78% dari target 24,48% persentase 104,55%. Pemotongan ternak produktif Awal tahun mengalami penurunana dari 455 ekor menjadi 113 ekor.
- Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan
Realisasi kinerja Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan 1,38% dari target 1,32% persentase 104,55%. Pengawasan Kesejahteraan Hewan pada 6 Kab/kota Balikpapan, Kukar, PPU, Paser, Bontang dan Samarinda dari 25 unit usaha yang dilakukan pengawasan terdapat 15 unit yang sudah menerapkan kesrawan.

- 3) Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan memiliki capaian realisasi 75,70 % dari target 58% dengan persentase 130,69%. Rekomendasi pada tahun 2024 yang adalah 854 rekomendasi dan yang disetujui 613 rekomendasi
- c. Capaian outcome Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat mencapai skor 100 dari target 96,68 skor atau 101,34%. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain: Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Program ini juga didukung oleh salah satu kegiatan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator sebagai berikut:
- Peningkatan Jumlah PAD
Realisasi PAD di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mengalami peningkatan Rp641.622.000 atau Rp190.000.000 atau sebesar 337,7%. PAD dengan rincian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp641.622.000 (unggas, hewan besar/kecil, pemakaian kandang observasi rabies, pemeriksaan darah, pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction), elisa, pemeriksaan fisik dan kimia pada bahan makanan asal hewan, biosey/identifikasi spesies daging/produk panga nasal hewan, pemeriksaan mikrobiologi, residu, dan sewa alat pengujian spektrofotometer).
 - Peningkatan Kepuasan pelanggan
Capaian kinerja Kepuasan Pelanggan mencapai skor 95,05 dari target 84 skor atau 113,15%. Hasil Survei terkait Persepsi Kualitas Pelayanan diolah secara deskriptif untuk membantu menggambarkan kualitas dengan menghubungkan angka-angka dan variable penilaian. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan UPTD. Laboratorium Keswan dan Kesmavet Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada 01 Agustus 2024.

Adapun nilai SPKP yang didapatkan yaitu 3,80 atau 95,05 persen yang masuk dalam kualitas pelayanan sangat baik.

- Peningkatan Ruang lingkup pengujian
Capaian realisasi 39 dari target 39 atau 100% selama tahun 2024. Terdapat penambahan ruang lingkup pengujian selama tahun 2024 sebanyak 5 ruang lingkup pengujian.
- Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ
Realisasi kinerja zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ 23 unit target 23 unit sebesar 100%. Kompartemen bebas kasus PHMSZ 23 unit dilakukan di Kab/kota Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Samarinda dan Kutai Barat pada komoditi Kambing dan Sapi.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Perizinan Usaha Pertanian memiliki capaian outcome Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan dengan skor 100 dari target 99,35 dengan persentase 101%. Program ini didukung dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sebagai berikut:

a. Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan

Realisasi capaian jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan sebanyak 122 unit dengan target 114 unit persentase 107%. Peran swasta pada tahun 2024 mengalami peningkatan 18 unit dari total 122 unit. Perusahaan yang berperan dalam bidang peternakan mayoritas adalah Perusahaan tambang Batubara.

b. Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice

Realisasi Capaian Jumlah Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice adalah 32,90% dari target 32,90% persentase 100%. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan 12 Perusahaan/inti bersama 328 orang/plasma.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian memiliki outcome Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan dengan capaian kinerja skor 99,99

dari target 99,74 persentase 100,25%. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian memiliki indikator sebagai berikut:
 - Jumlah pembudidaya unggas
Realisasi capaian kinerja jumlah budidaya unggas sebanyak 49.190 RTUP dari target 49.215 RTUP dengan persentase 99,95%. Pada tahun 2024 pembudidaya unggas yang mendapat pembinaan (RTUP) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan sebanyak 60 orang dari 13 kelompok
 - Persentase jumlah peternak milenial
Realisasi capaian jumlah peternak milenial adalah 75% dari target 75% dengan persentase 100%. Aktifitas indikator ini adalah melakukan pertemuan dan pembinaan kepada peternak milenial, pada tahun 2024 peternak milenial berjumlah 81 orang dari 5 Kab/kota (Berau 11 orang, Paser 12 orang, Balikpapan 16 orang, Bontang 30 orang, dan PPU 12 orang)
 - Rasio SD komoditas/ produk peternakan
Realisasi capaian kinerja mendapatkan rasio SD komoditas/produk peternakan 1,15 dari target rasio 1,15 persentase 100%
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan memiliki indikator Jumlah Desa Korporasi Ternak dengan realisasi capaian 9 unit PDKT dari target 9 unit persentase 100%. Desa Korporasi Ternak terdapat di 7 Kab/Kota (Balikpapan 1 unit, Berau 1 unit, Kubar 1 unit, Kukar 1 unit, Kutim 2 unit, Paser 2 unit dan Samarinda 1 unit). Pengembangan Desa Korporasi Ternak yaitu 1 (satu) unit DKT terdiri dari 2 kelompok yang berada didesa yang berdekatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kesejahteraan Peternak

Indikator:

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Tabel 2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	108,58	104,14	95.91

Pada tahun 2024 indeks yang diterima petani (It) sebesar 123,71 dan indeks yang dibayarkan petani (Ib) sebesar 118,78 sehingga diperoleh NTP tahun 2024 sebesar 104,14. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini tinggi, karena capaian kinerja mencapai 95,91% artinya sepanjang tahun 2024 petani ternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Hal yang dapat mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan adalah indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayarkan petani (Ib). Jika demand Masyarakat pada produk peternakan meningkat atau tinggi tetapi supply dari peternak rendah maka indeks indeks yang diterima petani (It) akan

meningkat. NTPP Kalimantan timur juga dipengaruhi oleh harga produksi, harga pakan, biaya logistic tinggi karena infrastruktur jalan/transportasi di Kalimantan Timur yang masih sulit antar daerah yang menyebabkan indeks yang dibayar petani (Ib) bisa lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima petani (It).

Tabel 3 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai Konstanta	107,23	104,14	-2,88

*Sumber BPS KALTIM

Pada tabel di atas terlihat adanya penurunan NTP Peternakan pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 dari 107,23 menjadi 104,14 atau mengalami penurunan sebesar -2,88%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap produk hasil peternakan. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir nilai NTP peternakan paling tinggi pada tahun 2019 mencapai 110,95 dan paling rendah pada tahun 2020 mencapai 101,65. Penurunan nilai NTP peternakan ini akibat dari bergesernya minat konsumsi produk segar ke produk beku, harga jual ayam hidup yang mengalami penurunan dan masih dalam transisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku yang menyebabkan penurunan produksi dan permintaan produk hasil peternakan.

Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya produksi pangan asal ternak

Indikator:

1. Produksi Daging
2. Produksi Telur
3. Produksi Aneka Ternak Lainnya

Pangan asal ternak sangat penting karena berkontribusi besar terhadap gizi, kesehatan, dan ketahanan pangan Masyarakat. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertambahan

penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Kurangnya konsumsi protein hewani dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting pada anak, anemia, serta penurunan fungsi kognitif dan fisik. Kesadaran akan pentingnya konsumsi protein hewani juga dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap produk peternakan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor peternakan dan kesejahteraan peternak lokal. Kebutuhan pangan asal ternak ini belum semuanya terpenuhi dari produksi lokal sehingga masih mendatangkan daging dari luar wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 4 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Produksi Daging
Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	76.024,70	77.652,26	102,14
2	Produksi Telur	Ton	15.294,50	15.397,23	100,67
3	Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	174,95	175,61	100,38
Capaian Kinerja Sasaran 2					101,06

*Angka Sementara Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2024)

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena capaian rata-rata produksi daging dan telur mencapai 101,06% yaitu produksi daging sebesar 102,14%, produksi telur sebesar 100,67 dan produksi aneka ternak lainnya 100,38%.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2024
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	76.110,37	77.652,26	2,03
2	Produksi Telur	Ton	15.594,32	15.397,23	-1,26
3	Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	166,62	175,61	5,40

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa produksi daging mengalami peningkatan sebesar 1.541,89 ton atau 2,03%, dari 76.110,37 ton menjadi 77.652,26 ton sedangkan untuk produksi telur mengalami penurunan (1,26%) atau sebanyak 197,09 ton dari 15.594,32 ton menjadi 15.397,23 ton sedangkan pada produksi aneka ternak lainnya mengalami kenaikan 5,40% sebanyak 159,62 dari 166,62 ton menjadi 175,61 ton.

Produksi daging mengalami peningkatan karena meningkatnya populasi di Kalimantan Timur dari Tahun 2023. Namun produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging Masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 92.994,89 ton/tahun pada Tahun 2024, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging dan produk olahan daging dari luar Kalimantan Timur. Keterbatasan lahan untuk pakan dan kawasan peternakan dan adanya penyakit hewan yang dapat mempengaruhi produksi daging.

Produksi telur secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 15.750,3 ton/tahun dan pada tahun 2024 produksi telur sebesar 15.397,23 ton mengalami penurunan 353,07 ton, sedangkan konsumsi telur mencapai 23.327,25 ton/tahun sehingga produksi telur belum dapat mencukupi konsumsi telur di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi telur antara lain UMP Kalimantan timur yang tinggi serta topografi lahan yang sulit menyebabkan biaya produksi tinggi sehingga kurangnya minat pengusaha untuk membuka usaha peternakan di Kalimantan Timur, kurangnya lahan pakan dan bahan baku pakan untuk unggas, dan peningkatan penyakit Avian Influenza (AI / Flu Burung) pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023-2024 mengalami kenaikan, pada tahun 2024 mengalami kenaikan produksi aneka ternak (walet, madu kelulut dan maggot) dari 166,62 ton menjadi 175,61 ton atau sebesar 5,40%. Hal ini disebabkan Permintaan sarang burung walet untuk kebutuhan ekspor di Indonesia terus meningkat sehingga mendorong peningkatan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya populasi ternak yang terbatas bergesernya minat konsumsi dari daging segar ke daging beku,

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Sasaran Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Catatan Analisis
		Tahun 2024	Target 2025	Target 2026	Tahun 2024	
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	108,58	109,12	110,00	104,14	
2	Produksi Daging (Ton)	76.024,70	77.773,30	79.717,60	77.652,26	
	Produksi Telur (Ton)	15,294.50	15,799.20	16,352.20	15.397,23	
	Produksi Aneka Ternak Lainnya	174,95	183,70	192,88	175,61	

Analisis Gambaran Tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas berisi tentang pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:

- (1). Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan;

- (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (9). Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

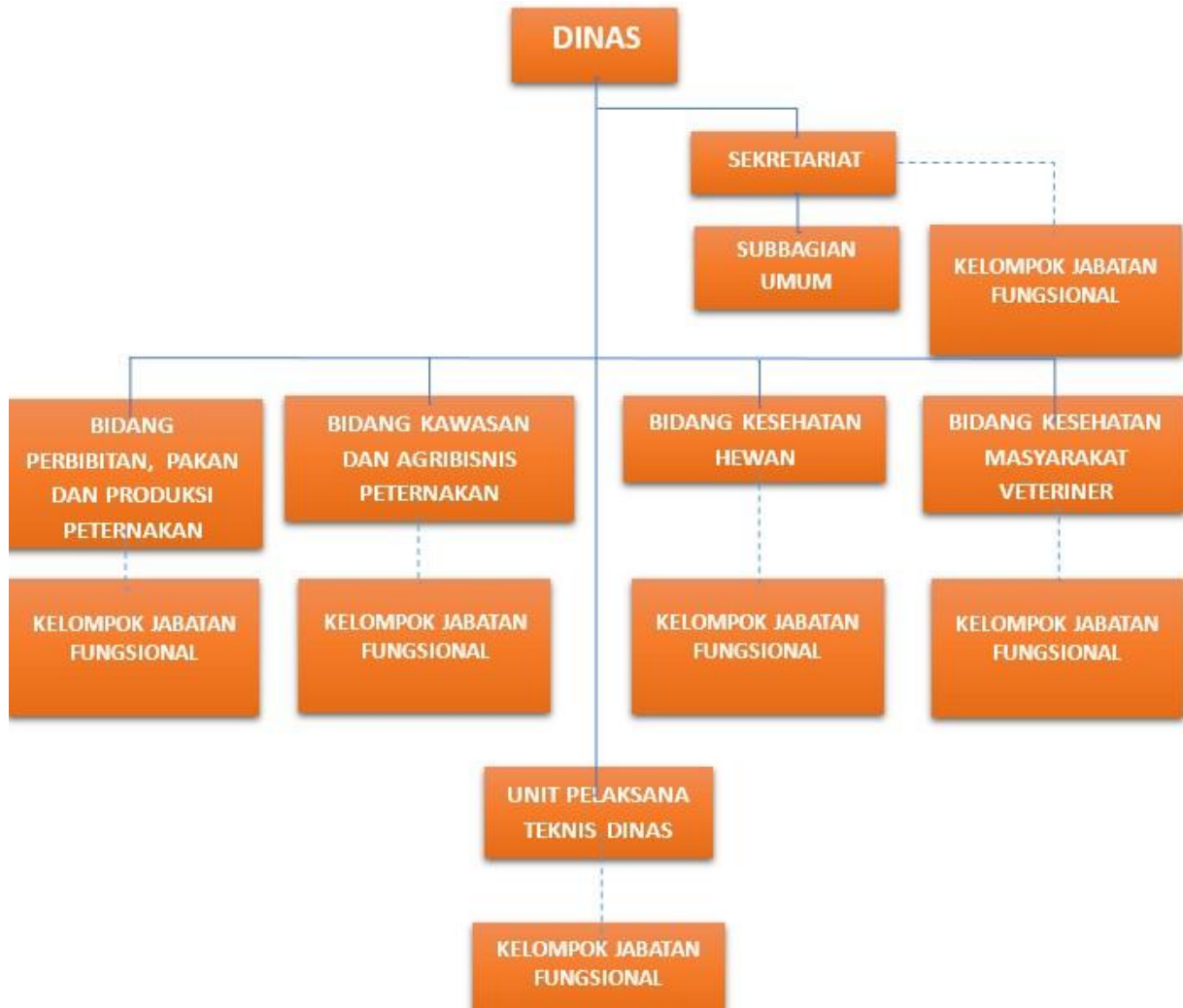
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan::
 - a. Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan
4. Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
6. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Benih dan Bibit Ternak
 - c. Seksi Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan

c. Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut:



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “Peran sub sektor peternakan dan keswan kurang optimal dalam diversifikasi ekonomi”, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Laju produksi lokal kurang optimal memenuhi kebutuhan pangan asal ternak;

Dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024 masih relatif rendah, dari 15 komoditas binaan sub sektor peternakan terdapat 8 komoditas dengan tren pertumbuhan positif, dan terdapat 7 komoditas mengalami tren penurunan. Permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik dan perlu strategi yang spesifik dan fokus penyelesaian masalah pada komoditas tersebut. Komoditas peternakan diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu komoditas Ruminansia, Komoditas Non Ruminansia (termasuk didalamnya aneka ternak). Komoditas ruminansia diantaranya adalah Sapi potong, sapi perah, Kerbau, Kambing, dan domba sedangkan komoditas non ruminansia diantaranya adalah Ayam Potong, Ayam Petelur, Ayam Buras (kampung), Itik, Puyuh, Merpati, Kelinci, Kuda, Babi dan itik manila.

Pertumbuhan negatif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas ruminansia terutama pada ternak sapi potong, Sapi Perah dan Kerbau mengalami tren penurunan pada masing-masing 0,45%, -2,58% dan -2,14%, namun terdapat komoditas ternak ruminansia yang mengalami pertumbuhan positif yaitu domba dengan pertumbuhan 18,69%. Sedangkan pertumbuhan positif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas non ruminansia ayam petelur, itik dan itik manila berturut-turut 9,69%, 7,26% dan 20,31%, namun juga terdapat penurunan pada komoditas ayam potong -0,56%.

No	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2020	2021	2022	2023	2024*	
1	S a p i	119,974	121,290	108,613	57,757	71,949	0.45
2	Sapi Perah	87	76	68	12	69	- 2.68
3	Kerbau	6,552	6,539	6,490	1,325	4,254	- 2.14
4	Kambing	69,929	68,997	58,552	26,978	40,783	4.88
5	Domba	635	694	642	611	935	18.69
6	Babi	83,652	76,292	45,839	18,957	28,832	2.60
7	Kuda	95	143	95	24	94	- 1.52
8	Ayam Buras	4,435,205	4,815,976	5,183,873	686,916	2,569,524	- 1.80
9	Ayam Petelur	1,218,994	1,223,739	1,340,217	1,282,503	1,295,328	9.69

No .	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2020	2021	2022	2023	2024*	
10	Ayam Pedaging	59,402,832	60,804,149	61,412,191	54,860,076	55,408,677	- 0.56
11	Itik	254,749	261,263	269,564	47,290	155,377	7.26
12	Kelinci	10,830	9,462	7,931	857	1,006	- 4.58
13	Puyuh	79,222	94,339	88,143	19,518	16,161	3.65
14	Merpati	5,015	5,375	5,678	5,735	5,792	4.65
15	Itik Manila	52,823	64,178	67,608	45,791	21,090	20.31

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2024

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah Pemotongan per Tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap Tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi Tahun 2022 sebanyak 108,613 ekor sehingga masih perlu penambahan 322,415 ekor. Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut:

- Bobot lahir rata-rata Kurang dari 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
- Rata-rata berat hidup sapi (NonBX) yang dipotong 242,15 kg sedangkan rata-rata berat potong sapi Brahman 292,50kg pada Tahun 2021 (BPS-RI, 2021).
- Angka Kelahiran dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 15,91%, Kerbau 28.84%, Kambing 21,02%. (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017).
- Angka Kematian dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 2,41%, Kerbau 7,27% dan Kambing 7,66% (BPS-RI, Survei.
- Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)Calving interval rata-rata 19,6 bulan. Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir sapi Bali hingga mencapai 25 kg dan Sapi silangan mencapai 35Kg, untuk bobot potong sapi Minimal 400 kg dan calving interval rata-rata 16- 17 bulan.

- b. Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak Tahun 2021 mencapai 36.400 Ton dengan luas kebun HPT 1.367Ha, dengan Produktifitas produksi hijauan mencapai 26,6 Ton/Ha/Tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan/manajemen perawatan HPT yang baik, pemupukan yang baik dan dengan bibit HPT yang berkualitas. Potensi produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 Ton/ha/Tahun.

- c. Kesulitan peternak dalam mengakses modal dan sistem agribisnis yang tidak kondusif (pasar tidak stabil, ketergantungan terhadap pasar lokal, pergeseran minat ke frozen)

Permasalahan potensi komoditas ternak lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Timur menjadi persoalan yang perlu ditangani. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap pengembangan potensi ternak lokal di Indonesia. Sehingga, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kurangnya akses pasar. Beberapa komoditas ternak lokal belum memiliki akses pasar yang luas sehingga peternak tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya.
3. Keterbatasan teknologi dan informasi. Peternak seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal yang mereka miliki.

4. Tidak adanya dukungan keuangan. Peternak kecil dan menengah seringkali kesulitan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan bisnisnya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat Konsumen belum sepenuhnya menyadari potensi dan nilai dari komoditas ternak lokal sehingga masih lebih memilih komoditas ternak impor.

Kalimantan Timur memiliki potensi ternak lokal seperti Kerbau Kalimantan Timur (Kerbau kalang), Rusa Sambar, Ayam Nunukan dan Aneka Ternak, yang belum di manfaatkan dan di eksplorasi secara maksimal agar dapat menjadi usaha peternakan yang menguntungkan. Aneka ternak yang juga menjadi potensi adalah budidaya Burung Walet, Kelinci dan Lebah Kelulut. Setiap jenis ternak tersebut memiliki keunggulan dan layak untuk dikembangkan dalam mendukung diversifikasi usaha peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- d. Masih adanya penyakit hewan menular dan wabah yang mengancam produktivitas ternak dan kesehatan masyarakat veteriner

Kesehatan hewan masih menjadi perhatian khusus untuk 3 Tahun kedepan, penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus terus diupayakan secara masif, agar Kalimantan Timur segera bebas dari wabah tersebut. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Kejadian penyakit baru selain PMK yang harus diwaspadai adalah penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi, dan Penyakit Lumpie Skin Deasease (LSD). Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kalimantan Timur terjadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Anaplasmosis, Tripanosomiasis, Babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah AI, jembrana, bruceolosis.

Kejadian penyakit Avian Influenza (AI) meningkat pada Tahun 2022

sebanyak 76 kasus dari Tahun 2021 sebanyak 5 Kasus, kejadian penyakit ASF meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 1.251 ekor dari Tahun 2021. sebanyak 784 ekor, dan PMK mulai terjadi Tahun 2022 sebanyak 123 ekor. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di Kalimantan Timur seperti Rabies, Salmonellosis, fasciolosis dan AI. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedik dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut. Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan

- e. Keterbatasan lahan untuk peternakan dan infrastruktur yang kurang memadai

Kawasan peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Di Kalimantan Timur, masih terdapat permasalahan terkait alokasi kawasan peternakan yang memadai. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya alokasi kawasan peternakan di Kalimantan Timur adalah:

1. Kurangnya dukungan pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika tidak ada dukungan yang cukup dari pemerintah Kota/Kabupaten, maka alokasi kawasan peternakan akan terbatas.
2. Keterbatasan lahan yang tersedia. Di Kalimantan Timur, lahan menjadi faktor pembatas dalam alokasi kawasan peternakan yang memadai. Jika lahan tidak cukup, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya kawasan peternakan yang memadai, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan

prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan pewilayahan komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

f. Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah

Akses pembiayaan untuk usaha peternakan sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan akses pembiayaan dalam usaha peternakan antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan. Banyak peternak yang tidak mengetahui produk pembiayaan yang tersedia untuk usaha peternakan sehingga sulit untuk memperoleh pembiayaan.
- b. Ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Persyaratan yang ketat dari lembaga pembiayaan seringkali sulit dipenuhi oleh para peternak, terutama bagi peternak yang baru memulai usahanya.
- c. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan biasanya meminta jaminan dalam bentuk aset yang cukup besar, dan hal ini seringkali menjadi kendala bagi peternak yang belum memiliki aset yang cukup besar.
- g. Kurangnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Keterlibatan swasta dalam pembangunan peternakan di Kalimantan Timur menjadi permasalahan yang masih perlu diperhatikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan swasta antara lain:

- Kurangnya insentif dari pemerintah untuk menarik investasi swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi

investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan.

- Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya layanan pendukung, seperti listrik, air, dan jalan yang baik, seringkali menjadi kendala bagi para investor swasta.
- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Tanpa adanya data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, para investor swasta cenderung enggan untuk berinvestasi.

Perusahaan peternakan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 unit di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan.

h. Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah

Masalah kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan yang masih rendah merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan sektor peternakan di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan antara lain:

- a. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan. Namun, kurangnya fasilitas dan program pelatihan dan pendidikan yang memadai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
- b. Rendahnya kualitas kemampuan manajemen peternakan. Masalah manajemen peternakan yang buruk dapat menghambat perkembangan peternakan dan menjadi hambatan dalam

meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

- c. Kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai. Dukungan kelembagaan yang memadai, seperti asosiasi peternak atau kelompok tani, dan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mendukung pengembangan peternakan. Namun, kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai dapat menghambat perkembangan peternakan dan mengurangi kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

Penurunan jumlah RTUP pada beberapa komoditas ternak menunjukkan bahwa terdapat penurunan minat usaha terhadap komoditas tersebut dengan berbagai alasan diantaranya adalah minat generasi peternak terhadap usaha peternakan yang turun, kasus penyakit hewan, kelayakan usaha dan permasalahan terbatasnya lahan usaha untuk peternakan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

Prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun program prioritas yang ditetapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Program Jospol nomor 1 yaitu Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern dengan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) dan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul. Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) tahun 2026 ditargetkan sebanyak 3 unit dengan dukungan anggaran sebesar Rp 9.900.000.000 dan Kegiatan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul berlokasi di UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan dukungan anggaran sebesar

Rp 5.000.000.000. Berikut Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Program Jospol nomor 1 yaitu Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern.

Tabel 7 Dukungan Anggaran Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Ternak Tahun 2026

Sasaran	Indikator sasaran	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Program (Rp)
Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	106,23 Nilai	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	90,54 Skor	50.057.076
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,08 Skor	81.018.000
			Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	82,02 Skor	1.511.506.612
Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Dan Komoditas Peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	91030,14 Ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan	85,57 Skor	5.775.491.806
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas kawasan untuk peternakan	500 Ha	1.672.657.000
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	94,97 Skor	702.103.506
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dinas dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,01 Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	107.166.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Indeks		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	100%	

Tabel 8 Dukungan Anggaran Kegiatan Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul Tahun 2026

Sasaran	Indikator sasaran	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Program (Rp)
Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Dan Komoditas Peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	91030,14 Ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak	85,95 Skor	228.700.150
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dinas dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	80,01 Nilai 87 Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	92,57 Indeks 100%	4.771.299.850

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program-program prioritas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian Program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan OPD dan telah terakomodasi dalam Rancangan Akhir RKPD tahun 2026.

Tabel 9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur
Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur				92.153.979.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur				83.788.529.000
02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				80.274.948.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				71.355.528.082
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	96,88 Score	40.767.730.466	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	35.385.026.593
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 %				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100%	530.458.392
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	94 %	1.914.622.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	100%	914.216.667
								Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	100%	
								Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu	88,89%	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	670.118.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	233.646.865
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	95.731.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.240.182

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	95.731.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.458.506
3.27.0 1.1.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	smd, bpn, ppu, luarProv	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	382.924.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	smd, bpn, ppu, luarProv	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	73.023.373
3.27.0 1.1.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	670.118.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	582.847.741
3.27. 01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	92 Score	24.018.578.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	31.727.498.078
								Persentase ketepatan realisasi angkas per triwulan	93.50%	
3.27.0 1.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/Bulan	22.486.881.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/Bulan	31.194.643.999
3.27.0 1.1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	765.849.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	447.815.112
3.27.0 1.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	12 Dokumen	95.731.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.958.667
3.27.01 .1.02.0 6	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	95.731.000	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.095.300

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	430.790.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	59.976.800
3.27.0 1.1.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	143.596.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.008.200
3.27. 01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	86 Score	478.655.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase inventarisasi BMD	82%	42.460.000
								PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	82%	
3.27.0 1.1.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	95.731.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.830.000
3.27.0 1.1.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	95.731.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.230.000
3.27.0 1.1.03 .03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	287.193.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.400.000
3.27. 01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Skor	622.251.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	77 Skor	111.883.000
3.27.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	95.731.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Smd	-	-	-
3.27.0 1.1.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	95.731.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.298.000
3.27.01 .1.05.0 5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	143.596.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	57.185.000

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Smd	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	287.193.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Smd	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	44.400.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86 %	1.627.428.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat pengelolaan kehumasan	83%	730.385.785
3.27.0 1.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	47.865.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.773.098
3.27.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	382.924.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.239.360
3.27.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	95.731.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	104.773.327
3.27.0 1.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	47.865.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen	19.800.000
3.27.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.053.043.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	488.800.000
3.27.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	86 %	95.731.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	95,10 %	93.028.703
								Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	96,30 %	

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	95.731.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	93.028.703
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 %	1.723.160.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	1.765.554.360
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	95.731.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.680.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	478.655.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.011.980
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.148.774.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.313.862.380
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86 %	1.196.638.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (Dinas)	96%	530.458.392
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	201.035.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	279.333.800
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	430.790.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	273 Unit	128.115.342
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	181.889.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	55.556.175

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	382.924.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	67.453.075
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	90,54 Skor	2.620.378.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	90,54 Skor	293.402.156
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	85,57 Skor	25.994.158.000			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan, dan produksi peternakan	85,57 Skor	25.531.861.959
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	5%	2.620.378.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	5%	293.402.156
			Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	58,20%						
			Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	725 KK						
			Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	970 Milyar, Rupiah						
3.27.0 2.1.01 .01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	1.572.227.000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	80.249.904
3.27.0 2.1.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.048.151.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Laporan	213.152.252

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.03	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Calving Rate	62%	6.540.466.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Angka kelahiran sapi	61,50%	21.410.992.943
			Persentase Akseptor IB dari Indukan	13,50%				Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB	275 Ekor	
			Jumlah bibit sapi ber-SKLB	280 Ekor				Jumlah kelahiran sapi hasil IB	1500 Ekor	
			Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	1,75%	Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba			3398 RT		
			Pertumbuhan Upgrade Closed house	72%	Persentase peredaran DOC dibawah standar			1,8%	2.541.907.160	
			Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	130 Unit Usaha	Persentase pertumbuhan closed house			64%		
					Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)			3754 RT		
					Jumlah usaha peternak unggas Non Ras			37661 RT		
			Jumlah usaha peternak petelur	335 RT						
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	6.540.466.000	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	21.410.992.943
3.27.02.1.04.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Laporan	2.767.120.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	2.541.907.160

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi		Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	42 Unit	3.270.233.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi		Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	95 Unit/Kelompok	1.210.643.602
			Luasan HPT	1250 Ha	3.773.345.000			Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	82%	
								Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal	65 Unit/Kelompok	
								Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon	100 Ha	
3.27.02.1.05.04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 Laporan	3.270.233.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 Laporan	961.480.975
3.27.02.1.05.05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	1 Dokumen	3.773.345.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	2 Dokumen	249.162.627
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	65%	838.521.000	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	96,09 %	368.318.254
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	838.521.000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	368.318.254
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Pengadaan Ternak	7200 (Indukan/ Bibit)	8.804.473.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		-	-	-

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 2.1.07 .04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1100 Ekor	8.804.473.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	-	-	-
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,80 Skor	1.397.535.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Luas kawasan untuk peternakan	500 Ha	2.030.051.143
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	158 Ha	1.397.535.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah investor usaha peternakan	5 Unit	2.030.051.143
			Jumlah Akses pembiayaan	133 (Rupiah, Milyar)						
			Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	5 Unit						
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.397.535.000	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.835.406.058
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	74.935.210
3.27.03.1.01.13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	10 Ha	--	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	10 Ha	119.709.875
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet		Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	92,45 Skor	6.708.168.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	94,97 Skor	3.022.595.414
			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	97,75 Skor	5.066.062.000			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,08 Skor	1.781.796.219

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Tingkat kesembuhan GANGREP	72 Kecamatan 83%	2.096.303.000 2.515.563.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan	96,30% 35 Kecamatan	2.615.245.414
			Persentase pelayanan kesehatan hewan	49%				Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity	280 Kelompok	
			-	-				Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	51,13%	
			Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	26%	628.890.000			Persentase wilayah yang terkendali rabies dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	82,52%	184.998.154
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	1.362.597.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan	886.338.600
3.27.04.1.01.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	40 Wilayah	733.706.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	40 Wilayah	141.993.308
3.27.04.1.01.05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	2.515.563.000	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	1.586.913.506
3.27.04.1.01.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	628.890.000	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	184.998.154
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan	88%	1.677.042.000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai	54,48%	407.350.000

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
			hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan					peraturan yang berlaku		
			Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	2,40%	419.260.000			Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar	98,15%	
3.27.04.1.02.04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	12 Laporan	1.677.042.000	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	2 Laporan	407.350.000
3.27.04.1.02.05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	419.260.000	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	-	-	-
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	91%	2.340.871.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	4,74%	1.579.277.884
			-	-	-			Tingkat kesadaran masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan	50%	
			Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,50%	209.630.000			Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	86,47%	

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
			Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	22%	1.048.151.000			Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH	26,37%	
			Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	33,6 Gram/Hari	209.630.000			-	-	-
3.27.0 4.1.03 .01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	11 Unit	838.521.000	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	-	-	-
3.27.0 4.1.03 .02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	1.680.536.000	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	649.999.871
3.27.0 4.1.03 .04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	7 Unit Usaha	209.630.000	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	94.280.203
3.27.0 4.1.03 .05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	660.335.000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	254.999.584
3.27.0 4.1.03 .06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	35 Unit Usaha	1.048.151.000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	10 Unit Usaha	479.999.769
3.27.04 .1.03.0 7	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	100 Orang	209.630.000	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	74.998.577

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.03.08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	-	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	24.999.880
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	65%	628.890.000	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	80,47%	17.520.181
3.27.04.1.04.03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	70 Dokumen	628.890.000	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	856 Dokumen	17.520.181
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian		Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,73 Skor	698.767.000	Program Perizinan Usaha Pertanian		Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	86,96	249.474.106
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	100%	559.014.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Akses Pembiayaan	63 Milyar, Rupiah	249.474.106
			Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	139 Unit	139.753.000			Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada	2,90%	
3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1200 Dokumen	559.014.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	141.185.232

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.06.1.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	139.753.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	108.288.874
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	99,78 Skor	4.891.372.000	Program Penyuluhan Pertanian		Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	82,02 Skor	2.530.862.100
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	1,139 Rasio	489.137.000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak	14 Dokumen	146.575.377
			Jumlah peternak millenial	125 Orang	1.467.412.000			Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	3 Unit/Klpg	391.407.044
			Jumlah pembudidaya unggas	49530 RTUP						
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	489.137.000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	146.575.377
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	25 Kelompok	1.467.412.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	8 Kelompok	391.407.044
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Desa Korporasi Ternak	11 Unit	2.934.823.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Persentase Peningkatan kompetensi Peternak	83%	1.684.225.402
								Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	1,21%	264.560.809
								Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	12 Dokumen	44.093.468

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 7.1.03 .05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah korporasi petani yang didampingi	33 Unit	1.956.549.000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah korporasi petani yang didampingi	22 Unit	1.684.225.402
3.27.0 7.1.03 .06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	11 Unit	978.274.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	3 Uni	308.654.277
02.02	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				6.987.669.000	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				9.611.988.891
3.27. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	96,88 Score	3.284.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	1.632.182.037
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100%				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	473.323.821
3.27. 01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	92 Score	262.736.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	134.762.000
3.27.0 1.1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ppu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	213.473.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ppu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	132.720.000
3.27.0 1.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.263.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.042.000
3.27. 01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	86 Score	328.420.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase inventarisasi BMD	83,50%	17.420.000
								PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	83,50%	
3.27.0 1.1.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	65.684.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.042.000
3.27.0 1.1.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	131.368.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ppu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	9.316.000

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.03 .03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ppu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	131.368.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ppu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.062.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Score	492.630.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	83,50%	25.800.000
3.27.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	ppu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	328.420.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	ppu	-	-	-
3.27.0 1.1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	ppu, smd, bpn, luarprov	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	164.210.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	ppu, smd, bpn, luarprov	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.800.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86%	656.840.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat pengelolaanaan kehumasan	83,50%	353.749.052
3.27.0 1.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ppu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.684.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ppu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.425.094
3.27.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ppu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	98.526.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ppu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	37.070.158
3.27.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ppu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	65.684.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ppu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.157.800
3.27.0 1.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ppu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	65.684.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ppu	-	-	-
3.27.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	361.262.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.096.000

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	86%	394.104.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	95,10%	18.198.941
								Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	96,30%	
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	197.052.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	-	-	-
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	ppu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	197.052.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin	ppu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.198.941
3.27.01.1.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86%	656.840.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	1.082.252.044
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	65.684.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	13.110.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.736.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	230.102.044
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	328.420.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	ppu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	839.040.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86%	492.630.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	83,50%	473.323.821

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	65.684.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ppu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	113.785.360
3.27.0 1.1.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ppu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	213.473.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ppu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	210.838.461
3.27.0 1.1.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	ppu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	213.473.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	ppu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	148.700.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	99 Skor	3.703.469.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak	85,95 Skor	7.506.483.033
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	204,5 ST	2.036.908.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah Populasi Ternak/Hewan	160 ST	6.321.606.225
			angka kelahiran	27%				angka kelahiran	41%	
			Calving Interval	16,3 Bulan				Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB	5,50%	
			Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	10%				Persentaser Jumlah Mortalitas/Kemati an Ternak/Hewan	3,10%	
			Angaka Mortalitas/Kemati an Ternak/Hewan	1,97%				-	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
			Jumlah produksi pupuk	25 Ton	1.666.561.000			Jumlah pupuk KOHE	25 Ton	1.184.876.808
			Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	20000 (Stek/pols/kg)				jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	155.000 Stek/pols/kg	
			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	1850 Ton				Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan	2.300 Ton	
			Jumlah PAD	RP 127.000.000				-	-	
3.27.0 2.1.03 .03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	ppu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	2.036.908.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	ppu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	6.321.606.225
3.27.0 2.1.03 .04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	ppu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1.666.561.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	ppu	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.184.876.808
02.03	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				4.891.362.000	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				2.821.012.027
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Layanan Kesekretariatan	96,88 Score	2.934.813.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	92,57 Indeks	1.118.314.159
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100%				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%	185.295.510
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	92 Score	234.785.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	3,75%	118.405.500
3.27.0 1.1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	190.763.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	115.320.000
3.27.0 1.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.022.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.085.500

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	86 Score	293.480.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase inventarisasi BMD	83,50%	17.068.677
								PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisas	83,50%	
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	58.696.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.869.609
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	117.392.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.396.568
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	117.392.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.802.500
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Score	440.223.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	146.741.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	smd	-	-	-
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	smd, bpn, luarprov	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	293.482.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	smd, bpn, luarprov	-	-	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86%	528.266.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat pengelolaaan kehumasan	83%	156.755.129
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.696.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.476.620
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	75 Paket	88.044.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	22.001.750

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan		
3.27.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	58.696.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.348.759
3.27.0 1.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	58.696.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	smd	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.960.000
3.27.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	264.134.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	109.968.000
3.27. 01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	86%	352.178.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	95,10%	170.363.453
								Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	96,30%	
3.27.0 1.1.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	smd	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	176.089.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	smd	-	-	-
3.27.0 1.1.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	176.089.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin	smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	170.363.453
3.27. 01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86%	586.963.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	85%	655.721.400
3.27.0 1.1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	58.696.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	15.200.000

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.0 1.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	234.785.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.681.400
3.27.0 1.1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	293.482.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	447.840.000
3.27. 01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86%	498.918.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	96%	185.295.510
3.27.0 1.1.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	58.696.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	101.331.200
3.27.0 1.1.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	190.763.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	69.978.598
3.27.0 1.1.09 .08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	58.696.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	4.440.000
3.27.0 1.1.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	190.763.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	9.545.712
3.27. 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	99,44 Skor	1.956.549.000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat layanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	94,28 Skor	1.517.402.358
	Penerapan Persyaratan		Jumlah Ruang lingkup pengujian	50 Absolut	1.956.549.000	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi		Persentase keterlambatan	2%	1.517.402.358

Rancangan Awal Rencana Kerja 2026						Hasil Analisis Kebutuhan				
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA
3.27.04.1.03	Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		penerbitan sertifikat hasil pengujian		
			Nilai Kepuasan pelanggan	88,31 Score				Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab	98,20%	
			Jumlah PAD	Rp 235.000.000				Persentase kesalahan hasil uji	1%	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	600 Dokumen	1.956.549.000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500 Dokumen	1.517.402.358

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan ada beberapa hal yang menjadi catatan dan penyesuaian:

1. Adanya sub kegiatan baru hasil dari penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Terdapat beberapa sub kegiatan yang dihilangkan guna efektifnya pelaksanaan kegiatan.
3. Terdapat perubahan indikator kinerja yang bertujuan untuk menciptakan indikator yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil serta menghasilkan evaluasi kinerja yang lebih relevan dan berdampak.
4. Adanya efisiensi anggaran yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 sehingga ada beberapa sub kegiatan yang dihilangkan/tidak dianggarkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat khususnya peternak disampaikan ke Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota, yang langsung ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim melalui Rapat Konsultasi dan Koordinasi Teknis Daerah (Rakontekda) dan Musrenbang kabupaten/kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Tabel 10 Usulan Aspirasi Langsung Kabupaten Kota

NO	ID USULAN	PENGUSUL	PROFIL PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	2536462	Dr. Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Tingginya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian yang menyebabkan turunnya sehingga perlu adanya penyediaan pupuk organik yang lebih banyak yaitu pupuk kotoran sapi (BL)	Kelompok Tani Mega Mulya Desa Bangun Mulya, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
2	2536532	Dr. Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Tingginya penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian yang menyebabkan turunnya sehingga perlu adanya penyediaan pupuk organik yang lebih banyak yaitu pupuk kotoran sapi (BL)	Kelompok Tani Ongko Makmur Bangun Mulya, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
3	2537336	Dr. Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Tidak tersedianya alat mekanisasi untuk pencacah runmpot dan pelepah sawit (BL)	Desa Gunung Makmur, Provinsi Kalimantan Timur	3	unit

NO	ID USULAN	PENGUSUL	PROFIL PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
4	2531705	H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Mobil Klinik Hewan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Kota Samarinda	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Jl. Biola No. 1, Provinsi Kalimantan Timur	1	unit
5	2530014	Ir. ENDAH ERNANY T, M.Si.	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	APBD I - Peningkatan populasi ternak sapi potong untuk peningkatan produksi daging di Kabupaten Berau	Sukan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket
6	2531113	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	DPPP Kota Balikpapan menghadapi tantangan dalam penanganan kesehatan hewan, khususnya hewan liar dan terlantar. Keterbatasan sarana, seperti tidak tersedianya mobil klinik hewan, menghambat upaya respon cepat di lapangan. Pelayanan jemput bola sangat dibutuhkan untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau serta meningkatkan upaya aktif penanganan dan pengendalian hewan. Ketersediaan mobil klinik hewan mendukung layanan lebih efektif, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan keswan	Jl. Syarifuddin Yoes Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan (Halaman Belakang Gedung Kesenian) Balikpapan Telp/ WA : 0822-2666-4430, Provinsi Kalimantan Timur	1	unit
7	2532284	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Poktan Sepakat Sukses menghadapi kendala dalam pengadaan bibit ternak akibat keterbatasan modal, bibit harus didatangkan dari luar daerah sehingga menambah biaya. Selain itu, kualitas genetik bibit lokal mulai menurun akibat inbreeding. Dibutuhkan dukungan permodalan dan akses bibit unggul yang berkualitas untuk pengembangan usaha ternak secara berkelanjutan. Selain itu, lokasi peternakan babi ini berada di dekat aliran Sungai Manggar (mengatasi pencemaran DAS Manggar)	Jl. Pasir Putih RT. 37 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
8	2532660	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Ba	Poktan Tunas Karya, Beringin Sadar, dan Sumber Rejeki	Poktan Tunas Karya (Jl. Mufakat	50	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	PROFIL PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
				bi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	mengalami kendala dalam pengembangan usaha ternak sapi akibat keterbatasan modal. Kebutuhan bibit ternak sapi jantan dan betina belum dapat dipenuhi secara optimal karena tingginya biaya sarana produksi peternakan, termasuk bibit ternak, pembuatan kandang dll. Dukungan permodalan dan bantuan sarana sangat dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas produksi/skala usaha dan mendorong kemandirian/kesejahteraan kelompok (penguatan ekonomi petani)	RT.31 Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan); Poktan Beringin Sadar (Jl. Mulawarman RT. 73 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan); Poktan Sumber Rejeki (Jl. Gn. Binjai RT.14 Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur), Provinsi Kalimantan Timur		
9	2532681	MURNI	Bappeda Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Peternak	KWT ER 5 Kelurahan Sepinggan membutuhkan pelatihan budidaya ayam buras untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis menjadi kendala dalam mengelola budidaya secara optimal. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil ternak, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat peran perempuan dalam sektor peternakan	Perum Daksa RT. 5 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
10	2530680	H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Untuk peningkatan produksi ternak di Kota Samarinda mendukung prioritas nasional dan provinsi dalam swasembada pangan	Jl. Biola No.1, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kota Samarinda		
11	2536493	Ade Rianto Embongbulan, S.T. M.Ling	Bappeda Kab/Kota	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kurang produktivitasnya ketersediaan Daging dalam mendukung percepatan program swasembada daging di Indonesia sehingga perlu adanya penambahan bibit ternak sapi bali (BL)	Kelompok Tani Subur II Kelurahan Petung, Provinsi Kalimantan Timur		

Tabel 11 Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	1539356	Abdul Rahman Agus	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bantuan Ternak Sapi "Kelompok Tani (SIDODADI)"	Kampung Linggang Purworejo, Kec Tering Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	11	ekor
2	1593177	Abdul Rahman Agus	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani "Berkah Jaya"	Kp Linggang Purworejo, Kec Tering Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	10	ekor
3	1605897	Abdul Rahman Agus	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bibit Ternak Sapi Kelompok Tani Harapan Bersama	Kampung Sumber Rejo, Kec Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	21	ekor
4	1611254	Abdul Rakhman Bolong, S.Kom	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Desa Loaduri Ilir memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan peternakan, khususnya ternak kambing. Namun, hingga saat ini pengembangan peternakan kambing belum optimal karena keterbatasan modal dan akses terhadap bibit kambing unggul.	Desa Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket
5	1615397	Abdul Rakhman Bolong, S.Kom	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Desa Loajanan Ulu memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan peternakan, khususnya ternak kambing. Namun, hingga saat ini pengembangan peternakan kambing belum optimal karena keterbatasan modal dan akses terhadap bibit kambing unggul.	Desa Loajanan Ulu, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur	55	Ekor
6	1543089	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Besarnya Kebutuhan Daging Sapi Pada Wilayah Samarinda Dan Sekitarnya Pada Kelompok Tani Berkat Rezeki Bersama	Jln. Padat Karya RT. 73 Kel. Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor Sapi
7	1543368	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan,	Kurangnya Peningkatan Produksi Hasil Ternak Dan Guna	Jl. Sukorejo Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara,	1	Unit

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Meningkatkan Efesiensi Kerja Pada Kelompok Tani Subur Kel. Lempake	Provinsi Kalimantan Timur		
8	1600791	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani gunung subur meminta bantuan kambing	Jl. Gunung subur, Dusun Kemuning, Desa Martadinata Kec. Teluk pandan, Provinsi Kalimantan Timur	50	Ekor
9	1600853	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani sumber rezeki meminta bantuan kepada pemerintah bantuan sapi	Jl. Kampung Kajang Kel. Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan, Provinsi Kalimantan Timur	14	ekor
10	1618738	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani Masdarling Meminta Bantuan Pengadaan ternak sapi	jl. suka rahmat rt. 09 desa suka rahmat kec. teluk pandan, Provinsi Kalimantan Timur	16	ekor
11	1618755	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kelompok tani meranti meminta bantuan pengadaan bibit sapi bali 50 ekor Terdiri dari sapi betina 45 dan sapi jantan 5 ekor, dalam rangka menyukseskan program gerakan pembangunan pemerataan dan kemandirian masyarakat kaltim	Desa Marah Haloq kec. Telen, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekot
12	1618928	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani ternak ingin maju meminta bantuan bibit sapi untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani, meminta 50 ekor sapi yaitu 45 ekor sapi betina dan 5 ekor sapi jantan	Jl. AMD rt. 06 desa Kelinjau ulu kec. muara ancalong, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
13	1618973	Arfan, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kelompok tani lembah hijau meminta bantuan pengadaan hewan ternak sapi untuk meningkatkan perekonomian kelompok	jln. sawitto desa muara bengalon kec. Bengalon, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
14	1534812	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak Sapi MUTIA JAYA mengajukan permohonan penggemukan ternak sapi	Jl. Poros RT.013 Dusun Tama Mulya Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	21	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
15	1534909	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani SALO MANIS MEKAR mengajukan permohonan bantuan Ternak Sapi	Jl. Batu Menetes RT. 17 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu, Provinsi Kalimantan Timur	15	ekor
16	1535172	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak SIKAMALI mengajukan permohonan ternak kerbau	Jl. KH. Dewantara Rt. 28 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
17	1535220	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani ALAM CEMARA mengajukan permohonan bantuan sapi	Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	32	ekor
18	1535259	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani BINA BERSAMA mengajukan permohonan bantuan sapi	Jln. Hidup Baru RT. 019 KM.45 Dalam Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat, Provinsi Kalimantan Timur	25	ekor
19	1571993	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani KARYA HIDUP BARU mengajukan permohonan bantuan penggemukan sapi untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan memaksimalkan dalam pemenuhan kebutuhan daging.	Jl. Hidup Baru KM. 45 RT. 06 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	25	ekor
20	1598253	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani PELUNCUR MAKMUR mengajukan permohonan penggemukan ternak sapi	Jl. Awang long RT. 19 Jaya Kecamatan Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
21	1598259	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak BERKAH JAYA CITRA mengajukan usulan permohonan bantuan ternak sapi	Jl. Pipe Line 14 Citra Tanjung Pude Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
22	1607001	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak KAMPUNG TERNAK mengajukan permohonan bantuan ternak sapi	RT. 1 Dusun I Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
23	1607452	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk	Kelompok Tani SEJAHTERA JAYA mengajukan permohonan bantuan pemotong rumput	Jl. Balikpapan - Handil II Pemedas Rt. 05 Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja, Provinsi Kalimantan Timur	13	Unit

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			Organik, dan Mobil Klinik Hewan)				
24	1615623	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Ternak SAMATURU mengajukan permohonan penggemukan sapi	Jl. Kayu Ara Rt. 035 Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	15	ekor
25	1629179	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani "PANTAI INDAH" mengajukan permohonan bantuan pengadaan ternak sapi	Terusan Rt.019 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu, Provinsi Kalimantan Timur	31	ekor
26	1618189	Budianto Bulang	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	KELOMPOK TANI BERINGIN JAYA MEMBUTUHKAN BIBIT SAPI UNTUK MENINGKATKAN PENGHASILAN DAN PRODUKTIFITAS KELOMPOK	DESA BENUA BARU KEC. MUARA BENGKAL, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
27	1619213	Budianto Bulang	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	BIBIT TERNAK BABI DAN KANDANG kelompok tani maju jaya	Jl. Tanjung Manis RT.03 Desa Long Tesak, Kecamatan muara ancalong, Provinsi Kalimantan Timur	300	ekor
28	1632333	Budianto Bulang	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	KELOMPOK TANI TENJEU MAKMUR MEMERLUKAN BIBIT SAPI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PETERNAKANNYA	JL. TANJUNG MANIS RT. IV DESA LONG TESAK KEC. MUARA ANCALONG, Provinsi Kalimantan Timur	24	ekor
29	1606068	Didik Agung Eko Wahono	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Perlunya Bibit dan Pakan Ayam untuk Kelompok Usaha Ternak Ayam "Ayam Makmur Mandiri"	Jalan Melati RT.13 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	1	ekor
30	1606117	Didik Agung Eko Wahono	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Perlunya Kandang Ayam untuk Kelompok Usaha Ternak Ayam "Ayam Makmur Mandiri"	Jalan Melati RT.13 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	1	ekor
31	1617259	Didik Agung Eko Wahono	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bibit ternak sapi	Rt.09 desa bukit raya kecamatan tenggarong sebrang kabupaten kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	200	ekor
32	1616845	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka	Masih belum terpenuhinya kebutuhan daging sapi di wilayah Samarinda	Kelompok Tani Bina Mulya Jalan Joyo Mulyo Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara,	20	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)		Provinsi Kalimantan Timur		
33	1616915	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Masih belum terpenuhinya kebutuhan daging Sapi di wilayah Samarinda	KELOMPOK TANI JAYA MAKMUR Jl. Joyo Mulyo RT. 13 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur	18	ekor
34	1617031	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kurangnya bibit Unggul Hewan ternak	Komunitas Pemuda Tani (KOMPENI) Jl. Letjen R. Suprpto No. 18 RT. 20 Kelurahan Api - Api Kecamatan Bontang Utara, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
35	1617079	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya produksi dan Produktivitas peternak Sapi Local maupun yang Peranakan	Kelompok Tani PETANI GEMAS jalan Gunung Lai RT. 27 Kelurahan tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, ,	30	ekor
36	1617114	Dr. Andi Satya Adi Saputra, Sp.Og., M.Kes	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kurang terpenuhinya kebutuhan daging kambing di kalimantan timur	Kelompok Tani Gunung Subur Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
37	1595290	Dr. Muhamma d Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengajuan Ternak Sapi Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang	Dusun Sidodadi RT 06 Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	35	ekor
38	1633998	Dr. Muhamma d Husni Fahrudin, S.Hut., MH	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Maju Bersama memohon Bantuan Ternak Sapi untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota Kelompoknya	Jl. Erlian RT 04 Desa Sanggulan Kec. Sebulu, Provinsi Kalimantan Timur	24	ekor
39	1568166	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	tingkat ekonomi masyarakat petani/peternak yang masih rendah	Dusun 1 RT.02, Desa Sidomulyo Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	23	Ekor
40	1592827	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	tingkat ekonomi masyarakat petani/peternak yang masih rendah	Jl. Dusun Sidorejo RT.012, Desa Margahayu, Kec. Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor
41	1617760	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya tingkat ekonomi petani	Jl. Kencanaa RT 03 No. 11 Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
42	1617771	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya tingkat ekonomi petani	Desa Loa Raya RT. 03 RT.47 Kec. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor
43	1617791	Firnadi Ikhsan, S.Pi	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya ekonomi masyarakat petani	Jl Danau Lipan RT.09 Desa Muara Kaman Ilir, Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur	500	Ekor
44	1552774	H. Agus Aras	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	kemiskinan dan kecilnya modal usaha ternak membuat kelompok tani sulit mengajukan kredit atau pinjaman, namun adanya potensi yang besar dalam peternakan sapi	RT.18 DUSUN TANAH DATAR, DESA TELUK SINGKAMA, SANGATTA SELATAN, KUTAI TIMUR, Provinsi Kalimantan Timur	100	Ekor
45	1554662	H. Agus Aras	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	keterbatasan modal bai kelompok tani, penurunan harga komoditas pertanian dan keterbatasan akses terhadap bibit unggul, diharapkan bantuan ini dapat mewujudkan kemandirian dan berkelanjutan usah ternak sapi kelompok tani	Jalan Manggis RT 04 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	30	Ekor
46	1577075	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya pemenuhan akan kebutuhan daging sapi serta guna meningkatkan penghasilan kelompok Ternak Maju Jaya desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu	Jalan Poror RT 07 Dusun Pelita Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	50	59
47	1614227	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Demi meningkatkan perekonomian kelompok Tani Kelansari Berseri Desa Sebulu Ulu mengajukan bantuan bibit Ternak Kambing Boer	Jl.Manunggal RT.02 Desa Sebulu Ulu Kec. Sebulu, Provinsi Kalimantan Timur	20	Ekor
48	1614258	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Mekar Wangi Desa Tani Bhakti memerlukan bantuan bibit ternak sapi bali untuk meningkatkan	Dusun Manunggal Jaya RT.12 Desa Tani Bhakti Kec.Loja Janan, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
				perekonomian kelompok			
49	1614281	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Pelita Desa Tani Bhakti memerlukan bantuan bibit ternak Sapi Bali untuk meningkatkan perekonomian anggota kelompok	Jl.Pondok Ore RT.07 Dusun Karya Bhakti Desa Tani Bhakti Kec.Loa Janan, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor
50	1616450	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih kurangnya pemenuhan daging sapi lokal di karena msh rendahnya produktifitas kelompok ternak Margahayu Makmur Desa Margahayu	Jalan Poros RT 009 Dusun Sidorejo Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	100	Ekor
51	1616588	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	masih rendahnya pemenuhan kebutuhan akan daging kambing serta melimpahnya pakan kambing di desa Sarinadi, maka kambing sangat cocok dikembangkan di desa Sarinadi	RT 11 Desa Sarinadi kecamatan Kota Bangun Darat, Provinsi Kalimantan Timur	25	Ekor
52	1595672	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok ternak Maju Jaya Desa Sawit Jaya memohon bantuan pengadaan hewan ternak sapi pada saat Reses karena kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli hewan ternak.	Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
53	1595732	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Makmur pada saat Reses meminta bantuan berupa pengadaan bibit ternak sapi, kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli bibit sapi.	Desa Kayungo Sari, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	22	ekor
54	1595747	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Harapan Jaya memohon bantuan berupa pengadaan bibit ternak sapi, kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli bibit sapi.	Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
55	1595819	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas	Kelompok Tani Makmur Jaya meminta bantuan pengadaan bibit	Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten	30	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			s dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	ternak sapi, kelompok tersebut kesulitan dan kekurangan modal untuk membeli bibit sapi.	Paser, Provinsi Kalimantan Timur		
56	1582980	Muhamma d Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	dalam rangka pengembangan peternakan dan peningkatan produksi peternakan	Palacari Ilir RT. 01, Desa Batu-Batu, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	28	ekor
57	1583014	Muhamma d Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Pengembangan Peternakan dsan Peningkatan Produksi Peternakan	Palacari Ilir, RT. 01, Desa Batu-Batu, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	26	kandang/unit
58	1606611	Muhamma d Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Memajukan Usaha Kelompok Ternak Sapi	Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	28	ekor
59	1606649	Muhamma d Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)	Untuk Menunjang Kegiatan dan Pemeliharaan Ternak Sapi oleh Peternak	Kp. Sidodadi RT. 11 Desa Tanjung Limau, Kec. Muara Badak, Provinsi Kalimantan Timur	26	kandang/unit
60	1618222	Muhamma d Samsun, S.E. M,Si	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Untuk Membantu Usaha Kelompok Tani (Bibit Ternak Kambing)	Jln. Raden Ismanun, RT. 04 Desa Loh Sumber, Kec. Loa Kulu, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
61	1601212	Salehuiddin , S.Sos, S.Fil	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan penggemukan ternak sapi untuk kelompok tani Martadipura Baru Desa Liang Kecamatan Kota Bangun	Jalan Panglima Suta Kanan RT 08 Desa Liang Kecamatan Kota Bangun, Provinsi Kalimantan Timur	16	ekor
62	1570522	Sigit Wibowo, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Dibutuhkan bibit ternak sapi betina dan sapi jantan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Mekar Jaya	Jl. Sisinga Magaraja RT 08 Desa Padang Jaya Kec. Kuaro, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
63	1613076	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	PERMOHONAN BANTUAN BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK SAPI	Jl. Desa Bangun Mulya Dusun III Desa Bangun Mulya Kec. Waru, Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
64	1617815	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Untuk meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan pendapatan petani	Jl. Tomat RT. 07 Desa Sebakung jaya Kecamatan Babulu, Provinsi Kalimantan Timur	15	ekor
65	1630002	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan bantuan usaha budidaya ternak sapi	Gang Melati RT. 03 Desa Sidorejo Kec. Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	22	ekor
66	1632167	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan bantuan ternak sapi	RT. 01 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	103	ekor
67	1632178	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	RT. 09 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	73	ekor
68	1632188	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jln. Pariwisata Dusun II Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	49	ekor
69	1632201	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengembangan ternak sapi	Jl. Pariwisata RT.01 Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	75	ekor
70	1632216	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. Gama RT. 03 Kelurahan Sesumpu kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	57	ekor
71	1632228	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan budidaya ternak sapi	Gang Melati RT.03 Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	49	ekor
72	1632271	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jln. Gama RT 04 Kelurahan Sesumpu kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	82	ekor
73	1632280	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengembangan ternak sapi	Jl. Pariwisata RT 01 Desa Sidorejo kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	42	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
74	1632303	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Ternak Sapi	Jl. Pariwisata RT. 06 Kelurahan Saloloang kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	46	ekor
75	1633728	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. Provinsi RT. 02 Km 02 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	1	Paket
76	1633740	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. Jambu RT. 01 Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam , Provinsi Kalimantan Timur	21	ekor
77	1633795	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan Pengembangan Budidaya Ternak Sapi	Jl. Mata Air Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
78	1633910	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jl. AMD RT 26 Kel. Penajam Kacamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
79	1634107	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	J. Desa Bangun Mulya Dusun III RT. 10 Kecamatan Waru , Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
80	1634113	Syahariah, SE	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan ternak sapi	Jln. Mawar RT. 01 Kelurahan. petung kecamatan penajam , Provinsi Kalimantan Timur	1	paket
81	1580626	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani Subur Makmur mengajukan permintaan bibit guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	desa rantau panjang kec.Tanah Grogot kab.paser, Provinsi Kalimantan Timur	50	ekor
82	1580630	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Ungeas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Harapan Rizki mengajukan bibit sapi guna menunjang produktivitas dan meningkatkan perekonomian warga desa setempat	desa mengkudu kec.batu engau kab.paser, Provinsi Kalimantan Timur	31	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
83	1580871	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permintaan kelompok tani Generasi Mandiri berupa bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	17	ekor
84	1580874	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Pengajun bibit ternak sapi oleh kelompok tani Jati Mulya guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	28	ekor
85	1580876	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permintaan bibit sapi oleh kelompok tani Serayung Makmur guna mendukung produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	18	ekor
86	1581370	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani "Tani Terpadu" mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Mengkudu Kec.Batu Engau Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	40	ekor
87	1581382	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Inled mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Modang Kec.Kuaro Kab.Paser, Provinsi Kalimantan Timur	17	ekor
88	1581580	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Rukun Karya mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna menunjang produktivitas dan perekonomian warga desa setempat	Desa Padang Pengrapat Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
89	1581608	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok Tani Truna Jaya Mengajukan permintaan bibit ternak sapi guna meningkatkan produktivitas dan perekonomian warga setempat	Desa Padang Pengrapat Kec. Tanah Grogot kab.PASER, Provinsi Kalimantan Timur	20	ekor
90	1616435	Yenni Eviliana, S.E	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka	Kelompok tani Sinar Pantai mengajukan permohonan bantuan bibit	Desa Lori Kec.Tanjung Harapan Kabupaten.Paser,	13	ekor

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
			ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	ternak sapi guna membantu produktivitas dan meningkatkan perekonomian warga desa	Provinsi Kalimantan Timur		
91	1581380	Yonavia, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	PERMOHONAN BANTUAN BIBIT BABI SIAP KAWIN (INDUKAN BABI)	Jalan AW senopati RT.8 Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	5	ekor
92	1586474	Yonavia, S.Sos	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permohonan Bantuan Bibit Sapi Jantan dan Betina bagi Kelompok Tani Sumber Rojo Koyo	Kampung Sumber Bangun Rt.002 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor
93	1524520	Selamat Ari Wibowo	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Kelompok tani SUMBER AGUNG mengajukan permintaan bibit ternak sapi	dusun mukti jaya desa jonggon jaya RT.016 kec.loakulu, Provinsi Kalimantan Timur	23	ekor
94	1524478	Selamat Ari Wibowo	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Permintaan bibit ternak sapi oleh kelompok tani JOYO MULYO guna meningkatkan taraf perekonomian warga setempat	dusun karya bhakti desa mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur	60	ekor
95	1616987	Dr. Muhammad Husni Fahuiddin, S.Hut., MH	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unngas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)	Bantuan Bibi Sapi Bali Timbul Mulya	Desa Sukamaju RT.08 Dusun Sidodadi Kec. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur	30	ekor

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mencermati Rancangan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan tema “Penggerak Utama Kawasan Timur Indonesia”, maka untuk mendukung pencapaian Rancangan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 tersebut maka Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan operasional yang meliputi program prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang dituangkan dalam empat program prioritas yaitu:

- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Program nilai tambah dan daya saing industry
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas bertujuan untuk memenuhi produksi daging secara nasional. Target produksi daging sapi/kerbau pada tahun 2025 sebesar 399,61 ribu ton, target produksi daging ayam tahun 2025 sebesar 4.339,6 ribu ton, target produksi daging itik tahun 2025 sebesar 44,66 ribu ton, target produksi daging babi tahun 2025 sebesar 104,49 ribu ton, target produksi daging kambing tahun 2025 sebesar 42,15 ribu ton, dan target produksi daging domba tahun 2025 sebesar 35,83 ribu ton. Target tersebut merupakan penyediaan protein hewani.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program nilai tambah dan daya saing industri bertujuan untuk meningkatkan produk ekspor seperti hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, serta bibit dan benih.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dari pembangunan pertanian oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Mengacu pada kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional serta Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur maka dapat disampaikan pokok-pokok pikiran Renja 2026 sebagai berikut:

1. Tema pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2026 adalah “Kolaborasi dan Penguatan Kelembagaan Peternakan untuk kemandirian protein hewani menuju Generasi Emas”.
2. Kebijakan operasional dengan berpedoman pada program pembangunan yang telah ditetapkan meliputi:
 - a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan didukung enam kegiatan yaitu pengawasan peredaran sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi, peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi, pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
 - b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan penataan prasarana pertanian didukung sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
 - c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan didukung kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi, penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan, sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan

- d) Program perizinan usaha pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
- e) Program penyuluhan pertanian dengan didukung dua kegiatan yaitu pengembangan penerapan penyuluhan pertanian dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan
- f) Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan didukung tujuh kegiatan yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan periode 2025-2019. Rencana Kinerja Tahun 2026 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut:

Tabel 12 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor peternakan(%)	1.89

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya daging, telur dan produksi aneka ternak lainnya, maka sasaran rencana kerja tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	106,23
2	Meningkatnya Produksi dan Daya Saing Dan Komoditas Peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	91030,14
3	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalisme ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Skor) Indeks Kepuasan Masyarakat (indek)	80.01 87.00

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, Kaltim Sukses memiliki makna keberhasilan membangun kaltim sebagai pusat perekonomian baru nasional yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan Generasi Emas dimaknai dengan adanya tekad dan semangat yang kuat untuk membangun kualitas SDM Kaltim menjadi sehat, cerdas, berakhlak dan produktif. Visi tersebut di dukung dengan enam misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Sejahtera
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat Ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2030 terdapat dua program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Program Gratispol dan Jospol. Dalam Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap Tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terkait dengan program unggulan gubernur dan wakil gubernur program unggulan yang terkait dengan program unggulan tersebut yaitu program jospol no 1. Hilirisasi industry peternakan melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern, Adapun program yang ditetapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mendukung program jopsol nomor 1 yaitu Pengembangan Desa Korporasi Ternak dan Hatchery ternak unggas. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 3 Tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dan perubahan terakhir Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di implementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada

misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Adapun jumlah Kegiatan yang tercantum dalam rancangan akhir rencana kerja yaitu 21 kegiatan dan 100 sub kegiatan. Berikut Kegiatan dan sub kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada Tahun 2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDH Tumbuhan dan Mikroorganisme
- c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan
- e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:

- Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
 - Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM
 - c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan
 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat

veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan
- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:

- Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

5. Program Perizinan Pertanian

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:

- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:

- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kowanan, meliputi sub kegiatan:

- Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Kegiatan yang tercakup dalam program di atas merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi dan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yang harus dijabarkan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan serta pengembangannya. Adapun total anggaran yang diusulkan melalui Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 83.788.529.000,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rancangan RKPD tahun 2026, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2026, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2026. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan perangkat daerah tahun 2026 pada tabel 14

Tabel 14 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur					83.788.529.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur			62.955.879.000
02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					71.355.528.082	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			54.866.582.800
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretariatan	Indeks	92,57		35.385.026.593	Indeks Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,03	35.913.070.681
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	%	100,00		530.458.392	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti	%	100	313.994.100
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	%	100,00		914.216.667	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	%	100,00	787.500.000
		Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	%	100,00			Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu	%	100,00	
		Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu	%	88,89			Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu	%	100,00	
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	smd	233.646.865	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	265.000.000
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	smd	14.240.182	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	12.500.000
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	smd	10.458.506	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	12.500.000
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	9	smd	73.023.373	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	9	95.000.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	smd	582.847.741	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	402.500.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,75		31.727.498.078	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi (Dinas)	%	3,50	32.052.989.880
		Persentase ketepatan realisasi angkas per triwulan	%	93.50			Persentase ketepatan realisasi angkas per triwulan (Dinas)	%	93,75	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	222	Smd	31.194.643.999	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	225	31.497.989.880
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Smd	447.815.112	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	450.000.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Smd	4.958.667	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5.000.000
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	Smd	10.095.300	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	10.000.000
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Smd	59.976.800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	80.000.000
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	Smd	10.008.200	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	10.000.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	82,00		42.460.000	Persentase inventarisasi BMD	%	84,00	55.062.000
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	82,00			PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	84,00	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Smd	9.830.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.332.000
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Smd	15.230.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	26.460.000
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Smd	17.400.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	18.270.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	77,00		111.883.000	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	79,00	133.761.057
3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	Smd	10.298.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	10.836.000
3.27.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	Smd	57.185.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	70.425.057
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	Smd	44.400.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	52.500.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	83,00		730.385.785	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	86,00	852.743.631
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Smd	32.773.098	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	31.500.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	Smd	84.239.360	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	80.811.333
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	Smd	104.773.327	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	109.922.838
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	3	Smd	19.800.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	25	20.361.600

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	488.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	610.147.860
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,10		93.028.703	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,30	16.175.237
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,30			Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,50	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	Smd	93.028.703	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	82	16.175.237
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	85,00		1.765.554.360	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	86,00	2.014.838.876
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Smd	16.680.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	17.501.400
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Smd	435.011.980	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	457.023.714
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Smd	1.313.862.380	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.540.313.762
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (Dinas)	%	96,00		530.458.392	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD (Dinas)	%	96,00	313.994.100
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	Smd	279.333.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	134.659.880
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	273	Smd	128.115.342	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	178	100.000.000
3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	Smd	55.556.175	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	53.084.220

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01. 1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	Smd	67.453.075	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	4	26.250.000
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	85,57		25.531.861.959	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88,14	9.089.518.019
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	90,54		293.402.156	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	92,35	300.000.000
3.27.02. 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	%	5		293.402.156	Persentase Peningkatan Omset Pemasaran Produk UPH	%	5,00	300.000.000
3.27.02. 1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	80.249.904	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4,00	100.000.000
3.27.02. 1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	213.152.252	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4,00	200.000.000
3.27.02. 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Angka kelahiran sapi	%	61,5	21.410.992.943	21.410.992.943	Angka kelahiran sapi	%	62	6.576.495.618
		Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB	Ekor	275			Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB	Ekor	325	
		Jumlah kelahiran sapi hasil IB	Ekor	1500			Jumlah kelahiran sapi hasil IB	Ekor	1750	
		Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba	RT	3398			Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan domba	RT	3428	
		Persentase peredaran DOC dibawah standar	%	1,8	2.541.907.160	2.541.907.160	Persentase peredaran DOC dibawah standar	%	1,7	864.500.000
		Persentase pertumbuhan closed house	%	64			Persentase pertumbuhan closed house	%	69	
		Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	RT	3754			Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	RT	4167	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah usaha peternak unggas Non Ras	RT	37661			Jumlah usaha peternak unggas Non Ras	RT	37681	
		Jumlah usaha peternak petelur	RT	335			Jumlah usaha peternak petelur	RT	355	
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	21.410.992.943	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	6.576.495.618
3.27.02.1.04.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	5	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	2.541.907.160	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	5	864.500.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan kewenangan Provinsi	Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	Unit/Kelompok	95		961.480.975	Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank pakan (unit/kelompok)	Unit/Kelompok	125	746.780.386
		Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	%	82			Persentase peningkatan mutu keamanan pakan	%	83	
		Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal	Unit/Kelompok	65		249.162.627	Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan lokal	Unit/Kelompok	80	433.092.019
		Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon	Ha	100			Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam bentuk polygon	Ha	200	
3.27.02.1.05.04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	961.480.975	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	2	746.780.386
3.27.02.1.05.05	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Dokumen	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	249.162.627	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Dokumen	2	433.092.019
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	%	96,09		368.318.254	Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu	%	96,59	468.649.996
3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu,	368.318.254	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan	Laporan	4	468.649.996

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Keamanan Obat Hewan yang Beredar			bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv		Keamanan Obat Hewan yang Beredar			
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas kawasan untuk peternakan	Ha	500,00		2.030.051.143	Luas kawasan untuk peternakan	Ha	600,00	2.880.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah investor usaha peternakan	Unit	5		2.030.051.143	Jumlah investor usaha peternakan	Unit	6	2.880.000.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.835.406.058	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	2.380.000.000
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	74.935.210	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	200.000.000
3.27.03.1.01.13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	10	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	119.709.875	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	10	300.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	Skor	94,97		3.022.595.414	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH	Skor	95,47	2.640.000.000
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	91,08		1.781.796.219	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	92,90	500.000.000
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak	%	96,3		2.615.245.414	persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ dari daerah terdampak	%	96,35	2.148.935.891
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan	Kecamatan	35			Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance hewan	Kecamatan	37	
		Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity	Kelompok	280			Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan Biosecurity	Kelompok	290	
		Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	%	51,13			Persentase hewan yang dilakukan pelayanan	%	51,63	
		Persentase wilayah yang terkendali rabies dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	%	82,52		184.998.154	Persentase wilayah yang terkendali dari Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)	%	84,46	100.118.400

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	886.338.600	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	4	983.014.256
3.27.04.1.01.04	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	40	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	141.993.308	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	45	167.320.540
3.27.04.1.01.05	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.586.913.506	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12	998.601.095
3.27.04.1.01.09	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	184.998.154	Jumlah kader zoonosis	Orang	50	100.118.400
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	54,48		407.350.000	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	63,47	491.064.109
		Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar	%	98,15			Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu lintas di titik sebar	%	98,7	
3.27.04.1.02.04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	407.350.000	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Laporan	2	491.064.109
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	4,74		1.579.277.884	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	5,52	382.788.600
		Tingkat Kesadaran Masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan	%	50			Tingkat Kesadaran Masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan	%	60	
		Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang	%	86,47			Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang	%	30,77	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		memenuhi persyaratan (ASUH)					memenuhi persyaratan (ASUH)			
		Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH	%	26,37			Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH	%	86,97	
3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	649.999.871	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2	75.000.000
3.27.04.1.03.04	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	5	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	94.280.203	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha	5	62.907.000
3.27.04.1.03.05	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	254.999.584	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	Unit Usaha	2	80.000.000
3.27.04.1.03.06	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	10	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	479.999.769	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	10	80.000.000
3.27.04.1.03.07	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	74.998.577	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400	58.626.200
3.27.04.1.03.08	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	1	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	24.999.880	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk	1	26.255.400
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	80,47		17.520.181	Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku	%	83,36	17.093.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.04. 1.04.03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	856	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	17.520.181	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	858	17.093.000
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	86,96		249.474.106	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	88,70	350.000.000
3.27.06. 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akses Pembiayaan	Milyar, Rupiah	63,00		249.474.106	Jumlah Akses Pembiayaan	Milyar, Rupiah	64,00	350.000.000
		Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada	%	2,90			Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan yang ada	%	2,90	
3.27.06. 1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	141.185.232	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	175.000.000
3.27.06. 1.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	108.288.874	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4	175.000.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	82,02		2.530.862.100	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	85,30	2.880.000.000
3.27.07. 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak	Dokumen	14		537.982.421	Jumlah Informasi Supply Demand Komoditas/Produk Peternak	Dokumen	14	700.000.000
		Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	Unit/Klpg	3			Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem integrasi dengan perkebunan sawit	Unit/Klpg	3	
3.27.07. 1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	146.575.377	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	200.000.000
3.27.07. 1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	8	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	391.407.044	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	5	500.000.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Peningkatan kompetensi Peternak	%	83		1.992.879.679	Persentase Peningkatan kompetensi Peternak	%	85	2.180.000.000
		Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	1,21			Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	1.31	
		Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	Dokumen	12			Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak	Dokumen	3	
3.27.07.1.03.05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	22	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	1.684.225.402	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	25	200.000.000
3.27.07.1.03.06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	3	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	308.654.277	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	3	1.980.000.000
02.02	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					9.611.988.891	UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			5.154.422.800
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	92,57		1.632.182.037	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,03	1.286.146.400
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		473.323.821	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	368.276.400
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,75		134.762.000	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,5	130.000.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	ppu	132.720.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	127.500.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	ppu	2.042.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	2.500.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	83,5		17.420.000	Persentase inventarisasi BMD	%	84	27.000.000
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	83,5			PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi	%	84	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	ppu	2.042.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.500.000
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	ppu	9.316.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	21.000.000
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	ppu	6.062.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	3.500.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	%	83,5		25.800.000	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	%	84	30.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	ppu, smd, bpn, luarprov	25.800.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	30.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaanan kehumasan	%	83,5		353.749.052	Tingkat pengelolaanan kehumasan	%	84	198.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	ppu	12.425.094	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	14.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	ppu	37.070.158	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	12.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	ppu	22.157.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	12.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	ppu	282.096.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	160.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,10		18.198.941	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,3	42.000.000
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	95,3			Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,5	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	ppu	18.198.941	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	42.000.000

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	85		1.082.252.044	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	86	859.146.400
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	ppu	13.110.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	15.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	ppu	230.102.044	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.422.800
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	ppu	839.040.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	663.723.600
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	83,5		473.323.821	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	84	368.276.400
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	ppu	113.785.360	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	145.000.000
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	ppu	210.838.461	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	170.000.000
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	ppu	148.700.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	53.276.400
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak	Skor	85,95		7.506.483.033	Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak	Skor	88,53	3.500.000.000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	160		6.321.606.225	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	175	1.700.000.000
		angka kelahiran	%	41,00			angka kelahiran	%	43,00	
		Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB	%	5,5			Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB	%	6,05	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Organisme Kewenangan Provinsi	Persentaser Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	3,10		1.184.876.808	Persentaser Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	3	1.800.000.000
		Jumlah pupuk KOHE	Ton	25			Jumlah pupuk KOHE	Ton	35	
		jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/pols /kg	155.000			jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/pols /kg	160.000	
		Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan	Ton	2.300			Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan	Ton	2.500	
3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	ppu	6.321.606.225	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12	1.700.000.000
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	ppu	1.184.876.808	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12	1.800.000.000
02.03	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					2.821.012.027	UPTD. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			2.934.873.400
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	92,57		1.118.314.159	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	93,03	1.047.916.700
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100		185.295.510	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	236.956.700
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,75		118.405.500	Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi	%	3,5	113.000.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	smd	115.320.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	110.000.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	smd	3.085.500	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3.000.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase inventarisasi BMD	%	83,5		17.068.677	Persentase inventarisasi BMD	%	84	26.000.000
		PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisas	%	83,5			PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisas	%	84	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	smd	1.869.609	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.000.000
3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	smd	5.396.568	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	9.000.000
3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	smd	9.802.500	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	11.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	83		156.755.129	Tingkat pengelolaana kehumasan	%	86	176.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	smd	11.476.620	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.000.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	smd	22.001.750	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	20.000.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	smd	9.348.759	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	14.000.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	smd	3.960.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	4.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	smd	109.968.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	127.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,1		170.363.453	Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu	%	95,3	-
		Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,3			Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	%	96,5	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	smd	170.363.453	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	85		655.721.400	Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan	%	86	732.916.700

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.27.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	smd	15.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	14.000.000
3.27.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	smd	192.681.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	221.500.000
3.27.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	smd	447.840.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	497.416.700
3.27.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	96		185.295.510	Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD	%	96	236.956.700
3.27.01. 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	smd	101.331.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	114.956.700
3.27.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	smd	69.978.598	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	63.000.000
3.27.01. 1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	smd	4.440.000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	20.000.000
3.27.01. 1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	smd	9.545.712	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	39.000.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat layanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Skor	94,28		1.517.402.358	Tingkat layanan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Skor	94,75	1.650.000.000
3.27.04. 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian	%	2		1.517.402.358	Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian	%	6,50	1.650.000.000
		Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab	%	98,2			Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab	%	94,75	

Rencana Kerja 2026							Perkiraan Maju 2027			
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Persentase kesalahan hasil uji	%	1			Persentase kesalahan hasil uji	%	0,90	
3.27.04. 1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	500	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkk, luarPrv	1.517.402.358	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	600	1.650.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan, serta sub kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Rencana Kerja juga berfungsi untuk memperhatikan kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, sebagai upaya mendukung Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja. Kemudian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

LAMPIRAN

LAMPIRAN 2.
Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten/Kota

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Bhayangkara Nomor 54, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 743921, Faksimile (0541) 736228

Laman peternakan.kaltimprov.go.id, Pos-el disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 500.7.2/819/DPKH-I

T e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a) bahwa Kegiatan Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 perlu dilaksanakan dengan sebaik- baiknya agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- b) agar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Tahun 2026 dapat tersusun, maka perlu ditetapkan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja;
- c) bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim penyusunan tersebut;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Memperhatikan : DPA-SKPD Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur No. : 3-27.0-00.0-00.02.01 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026 adalah mengkompilasi dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalimantan Timur, Rencana Strategis Pembangunan Kalimantan Timur, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Nasional, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Kalimantan Timur, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan teknis yang perlu segera ditindaklanjuti;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaran Kerja Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 16 Agustus 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 500.7.2/819/DPKH-I

Tanggal : 16 Agustus 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2026 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	<u>Fahmi Himawan, S.T., M.T</u> NIP. 19741216 200604 1 006	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggung Jawab
2.	<u>Fadli S, S.Sos.M.Si</u> NIP. 19741207 199403 1 003	Sekretaris	Ketua
3.	<u>H. Rofik, S.Pt</u> NIP. 19791017 200903 1 002	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	<u>Delsi Isyawati, SE</u> NIP. 19751225 200701 2 016	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5.	<u>Meliana, SE</u> NIP. 19810525 200901 2 001	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6.	<u>Isa Prahatino, S.Pt</u> NIP. 19860508 202521 1 017	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	<u>Hendy Darmawan, S.Pt</u> NIP. 19881010 202521 1 032	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	<u>Yogi Gunara Ryana, SE</u> NIP. 19920428 202521 1 009	Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	<u>Nisa Nur Istiqomah, S.Pt</u> PPBASN	Petugas Data Evaluasi Kinerja	Anggota
10.	<u>Nurul Khairia, S.Hut</u> PPBASN	Petugas Analisis Rencana Strategis	Anggota
11.	<u>Rival Rinaldi, S.Sta</u> PPBASN	Pengelola Data Statistik Peternakan	Anggota

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Prov. Kalimantan Timur telah dilaksanakan kesepakatan forum lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 khususnya pengampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 pada **Sasaran 1 Terakselerasinya Perekonomian Daerah**, dihadiri oleh perangkat daerah dan pihak pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pengantar Dari Pimpinan Rapat (Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)
2. Penyampaian materi :
 - a. Penyampaian Output Utama Sektor Perkebunan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Perkebunan)
 - b. Penyampaian Output Utama Sektor Pariwisata dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Pariwisata)
 - c. Penyampaian Output Utama DPPKUKM dalam mendukung LPE, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan serta Pengendalian Inflasi melalui Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)
 - d. Penyampaian Output Utama Sektor Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim)
 - e. Penyampaian Output Utama Sektor Peternakan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim)
 - f. Penyampaian Output Utama Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim)
 - g. Penyampaian Output Utama Sektor Kehutanan dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)

- h. Penyampaian Output Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mendukung LPE (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim)
 - i. Pengendalian Inflasi melalui Optimalisasi TPID (Kepala Biro Perekonomian)
 - j. Strategi memperkuat Daya Saing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kaltim (Kepala BRIDA Prov. Kaltim)
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum lintas perangkat daerah terhadap sasaran Akselerasi Perekonomian Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran IV, maka pada:

Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MENYEPAKATI

- KESATU : Indikasi Program Prioritas dan Output Utama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Indikasi Program Perangkat Daerah dan Output Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026 dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Saran, masukkan dan koreksi forum lintas perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 22 April 2025
Pimpinan Sidang

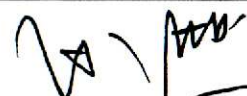
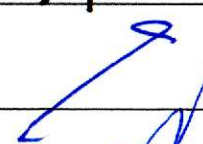


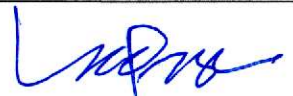
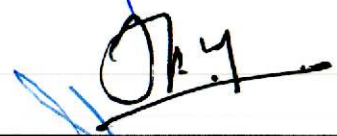
Ir. Ujang Rachmad, M.Si

LAMPIRAN I**Penandatanganan Kesepakatan oleh Peserta Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029****DPRD Provinsi Kalimantan Timur**

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1			Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur	

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1	Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi, M.Si	Kabid PSDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	
2	H. Warsito, ST	Sekretaris	Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim	
3	Ir. Hj. Rini Susilawati, M.Si.	Sekretaris	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim	
4	Andi Siddik, SP, M.Ling	Plt. Kadis	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	

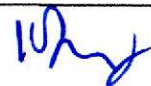
No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
5	Fahmi Himawan, S.T., M.T..	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	
6	H. Irhan Hukmaidy, S.Pi, MP	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	
7	H. Mohammad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.,	Sekretaris	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	
8	Herlina Eka Yanti, SE, M.Si	Adyatama Kepariwisataa Ahli Muda	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim	
10	H. Fahmi Prima Laksana, S.E.,MM.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim	
11			Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	
12			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	
13			Dinas Sosial Prov. Kaltim	
14			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
15	Dr. M. Ir. Fitriansyah, ST, MM	Kepala Dinas	Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Kaltim	
16	Anik Suhartatik, S.Sos	Kabag Kebijakan Perekonomian	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	

Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1	Dr. Achmad Zaini		Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas	

Instansi Vertikal

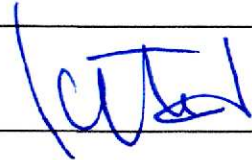
No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Bank Indonesia Wilayah Kaltim	
2	Ika Ayuningtyas	Statistisi Ahli Madya	BPS Provinsi Kalimantan Timur	
3	Ayat Nur Hidayat	Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur	
4			Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur	

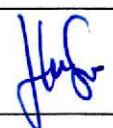
Unsur Akademisi

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1			Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	
2			Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Balikpapan	
3			Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepala Masyarakat UINSI Samarinda	

Unsur Asosiasi/Dunia Usaha

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	TandaTangan
1			Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kaltim	
2			Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur	
3			Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalimantan Timur	
4			Ikatan Ahli Perencana (IAP) Kaltim	
5			Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim	
6			Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kaltim	
7			Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim	
8			Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
9			Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim	
10			Himpunan Pramuwisata Indonesia Kaltim	
11			Komite Ekonomi Kreatif Kaltim	
12			Komite Daerah Ekonomi Syariah Kaltim	
13	Adung Karyo Sedio Utomo	Sekretaris	Himpunan Pengusaha Domba dan Kambing Indoensia Kaltim (HPDKI)	
14			Perhimpunan Inshan Perunggasan Rakyat (PINSAR)	
15			Gabungan Pelaku dan Pemerhati Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (GAPENSISKA)	
16	Kholid S	Ketua Bidang	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kaltim	
17			Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
18			PT. Kaltim Melati Bakti Satya	
19	Hasrun Jaya	Sekretaris	Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim	
20			Adipati Nusantara (Asosiasi UMKM)	
21	Jumri	Sekretaris	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kaltim (DEKOPINWIL)	

FORMAT LAMPIRAN II
PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1, Terwujudnya Kaltim Sukses,
 Sasaran 1, Akselerasi Perekonomian Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET	
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov, Kaltim					98.618.880.000		75.722.500.000		135.262.500.000		172.153.750.000		43.540.000.000			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	38	2.500.000.000	43	2.550.000.000	48	2.600.000.000	53	2.650.000.000	58	2.700.000.000	Business Matching, Msi Dagang, fasilitasi promosi produk	Outcome kinerja dipilih karena lebih menceminkan program prioritas peningkatan ekspor non migas non batu bara Kaltim dan lebih tepat pada tupoksi bidang perdagangan	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	1.800.000.000	31,5	2.000.000.000	35	2.200.000.000	38,5	2.400.000.000	42	2.600.000.000	-fasilitasi UKM potensial Ekspor	Dim PP 7 Th 2021 ttg kemudahan berusaha, Data UKM Kaltim: 326 (omset 2 15 M) UKM Ekspor 2024: 80 UKM	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha (%)	4,86	8,86	25.150.000.000	10,86	26.300.000.000	12,86	21.500.000.000	14,86	21.300.000.000	16,86	1.500.000.000	-Pemberdayaan Kewirausahaan Terpadu "JOSPOL KALTIM PRENEUR"	Sistem SIDT kemenkopUKM Tahun 2024 jml UKM: 72.000 Penambahan 2% setiap tahun	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	1.250.000.000	65	1.375.000.000	70	1.512.500.000	75	1.663.750.000	80	2.100.000.000	- Pendataan Koperasi - Fasilitasi Koperasi	Hasil pemeriksaa koperasi adalah menilai koperasi berkualitas/ Tidak Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi	
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	37,82	47	67.918.880.000	52	43.497.500.000	57	107.450.000.000	62	167.840.000.000	67	34.640.000.000	- Pengembangan Kawasan Industri - Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Tahun 2024 realisasi investasi sektor industr: 27,81 T Tahun 2024 Target investasi sektor industr : 73,54 T	
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	1.398.000.000	1,06	878.951.087	1,06	966.846.196	1,06	1.063.530.816	1,06	1.169.883.898	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase semakin kecil semakin stabil harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, karena semakin kecil ketergantungan dengan daerah lain	
2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov, Kaltim					9.269.100.453		14.339.361.911		14.807.045.359		15.067.393.070		15.767.147.140			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	4,89	1,18	250.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.300.000.000	1,18	5.500.000.000	1).Penyediaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan, 2).Gerakan Tanam/Panen, 3).Koordinasi dan Sinkronisasi 4).Monitoring dan Evaluasi,		
		Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	12,33	7,00	7.519.100.453	9,25	7.639.361.911	11,00	8.107.045.359	11,75	8.267.393.070	12,35	8.767.147.140	1).Penyediaan Sarana Pertanian Hortikultura, 2).Sarana Pascapanen, 3).Sarana Pengolahan, 4).Data Produksi Hortikultura, 5).Registrasi Kebun Hortk 6).Monitoring dan Evaluasi,		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	10.195,06	16.415,06	1.500.000.000	21.415,06	1.500.000.000	30.462,06	1.500.000.000	42.462,06	1.500.000.000	42.462,06	1.500.000.000	Perda / Perbup LP2B Kab/Kota		
3	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusa Pertanian yang Meningkat Kapastasiya (%)	77,00	78,00	1.296.865.590	78,50	1.394.638.580	79,00	1.394.638.580	79,50	1.394.638.580	80,00	1.394.638.580	1).Pelatihan Teknis Pertanian, 2).Bimbingan Teknis Pertanian,		
3. Dinas Perkebunan Prov, Kaltim					17.097.004.856		19.551.893.730		21.544.467.753		23.766.629.479		26.271.007.317			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096		20.092.114		20.180.519		20.180.519		20.358.499		Peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan		
		Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan(%)	n/a	16,67	15.853.350.076	33,33	19.174.990.230	50	21.167.564.253	66,67	23.389.725.979	83,33	25.894.103.817			
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	1.243.654.780	40.450	376.903.500	36.750	376.903.500	33.400	376.903.500	30.050	376.903.500	Peningkatan Luasan Areal Perkebunan		
		Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	n/a	12		24		48		72		100		Peningkatan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani		

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			Tahun 2026
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	9,69	30,35	2.998.929.120,00	47,76	2.708.701.026,00	65,17	2.605.071.128,00	82,59	2.738.578.241,00	100	2.895.436.065,00	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	26,5	40,59		55,45		70,3		85,15		100		Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pekebun	
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim				41.810.780.987		44.823.745.314		48.606.201.716		52.709.570.166		55.084.543.512			
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi (Skor)	80,66	85,57	15.561.280.987	88,14	16.873.745.314	90,78	18.481.201.716	93,51	20.409.470.166	96,31	20.534.543.512	1)Pengadaan Temak Sapi 2)Pengadaan Temak Kambing/Domba 3)Paket Usaha Unggas Lokal 4)Paket Usaha Unggas Ayam Petelur Luas HPT Unggul	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	94,81	95,76	2.300.000.000	96,24	11.300.000.000	96,72	3.300.000.000	97,20	2.300.000.000	97,69	1.800.000.000	Luas Kawasan peruntukan peternakan	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH (skor)	91,25	94,97	9.250.000.000	95,47	10.200.000.000	95,97	11.150.000.000	96,47	12.100.100.000	96,97	13.125.000.000	1)Jumlah wilayah terkendali 2)Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3)Check poin 4)Lab keswan dan kesmavet	
		Tingkat pengendalian kesehatan veteriner (skor)	87,54	91,08	6.749.500.000	92,90	7.450.000.000	94,76	8.125.000.000	96,65	8.800.000.000	98,58	9.475.000.000	*wilayah tidak ada peningkatan kasus GHPR *sapi betina yang dipotong di RPH yang telah mendapatkan SKSR/AMPM yang sesuai standar *produk pangan segar asal hewan yang diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) *Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat NKV atau Sertifikat Pra-NKV	
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (skor)	75,83	82,02	10.250.000.000	85,30	10.300.000.000	88,71	10.850.000.000	92,26	11.400.000.000	95,95	11.950.000.000	1) Unit usaha yang menerapkan sistem integrasi 2) Jumlah peternak dilatih 3) Pembentukan desa koperasi temak 4) Intervensi infalasi/deflasi	
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim				1287402000		1072000000		1199000000		1324000000		1456400000			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	214.694,0	223.367,8	3.835.000.000	227.834,9	4.150.000.000,0	232.391,7	4.560.000.000,0	237.039,5	4.910.000.000,0	241.780,3	8.012.400.000	1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana di 6 PPI 3. Penerbitan izin kapal	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	241.728,4	258.945,5	8.950.158.964	268.008,6	9.173.912.937	277.388,9	9.347.304.738	287.097,5	9.580.987.357	297.145,9	13.511.710.000	1)Bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan. 2)Bimtek, pelatihan, sosialisasi teknis perikanan budidaya. 3)Pengembangan inovasi dan teknologi perikanan budidaya 4)Pembinaan sertifikasi CPB, CBIB dan monitoring penyakit ikan.	
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	139.937,00	154.233,40	1287402000	161.882,80	1072000000	169.977,00	1199000000	178.475,90	1324000000	1.877.399,70	1456400000	Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemerakan dan PMT-AS)	
		Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)	4.987.154	5.803.184.818		6.152.768.866		6.531.188.803		6.978.126.009		7.495.987.647			

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6, Dinas Kehutanan Prov, Kaltim				32.312.366.700		92.936.666.886		92.936.666.886		92.936.666.886		92.936.666.886			
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	6.293.432.95	6.402.024.00	47.478.300.186	6.461.888,27	47.478.300.186	6.525.929.11	47.478.300.186	6.594.146.54	47.478.300.186	6.665.844,44	47.478.300.186	- Pemantauan tutupan lahan --> Persentase Tutupan Lahan - Sosialisasi batas kawasan hutan --> Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan	
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1.545	1645	458.366.700	1695	458.366.700	1745	458.366.700	1795	458.366.700	1845	458.366.700	- Pemantauan tutupan lahan --> Persentase Tutupan Lahan - Sosialisasi batas kawasan hutan --> Kegiatan Sosialisasi Batas Kawasan - Data dan informasi mitigasi perubahan iklim --> Data Mitigasi Perubahan Iklim - Pembinaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan --> Pembinaan terhadap PPBH	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1500000000	3250000000	31854000000	3.500.000.000	45000000000	#####	45000000000	4.000.000.000	45000000000	4.250.000.000	45000000000	- Pengumpulan data NTE kelompok kehutanan secara berkala. - Pengembangan sistem informasi berbasis digital untuk memantau perkembangan usaha kelompok.	
7, Dinas Pariwisata Prov, Kaltim				22.625.000.000		24.050.000.000		24.475.000.000		24.900.000.000		25.325.000.000			
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	1,69	2,19	8.625.000.000	2,69	9.050.000.000	3,19	9.475.000.000	4,01	9.900.000.000	4,51	10.325.000.000	Penyediaan Sarpras Destinasi Pariwisata Provinsi Kaltim secara kuantitas dan kualitas sehingga menambah jumlah kunjungan wisatawan	Data Jumlah Sarpras Destinasi Pariwisata Provinsi Kaltim yang dibangun/direhab (Pemeliharaan/Rehab/Pengadaan)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3,55	5,07	14.000.000.000	6,08	15.000.000.000	7,09	15.000.000.000	8,11	15.000.000.000	9,12	15.000.000.000	1, Peningkatan kualitas produk dan karya pelaku ekraf 2, Pelaku ekraf bersertifikat HKI 3, Peningkatan jumlah pasar melalui aktivasi ruang kreasi dan event pameran dan pertunjukan	Data jumlah pelaku yang terus bertambah diperkirakan 1,650 (seribu enam ratus lima puluh) Kegiatan aktivasi ekraf bertambah melalui event pameran dan pertunjukan unggulan
8, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov, Kaltim				15.049.753.304		14.999.979.715		15.712.535.686		17.055.447.254		19.300.000.000			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang melakukan investasi besar (di atas 10 M) (Pelaku Usaha)	N/A	9	5.062.420.000	11	3.812.420.000	13	3.962.420.000	15	4.412.420.000	17	5.800.000.000	1. Penyusunan RUMPD Kaltim 2. Penyusunan Kajian Peta Potensi Investasi Kaltim 3. Pendampingan fasilitasi hilirisasi investasi strategis	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)	N/A	2	3.592.268.904	2	3.535.559.715	2	3.889.115.686	2	4.278.027.254	3	4.500.000.000	1. Pameran investasi dalam & luar negeri 2. Forum investasi (MIF, One on One Meeting) 3. Publikasi Promosi Digital	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (Nilai IKM)	93	93,25	6.395.064.400	93,58	7.652.000.000	93,91	7.861.000.000	94,25	8.365.000.000	94,6	9.000.000.000	1. Penyediaan pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS dan e-ptsp 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan pelaku usaha 3. Pemantauan lapangan pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha dan non perizinan	
9, BRIDA Prov, Kaltim				0		0		0		0		0			
1	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti (%)	65	67		70		70		72		73		Penelitian dan Pengembangan : Publikasi Ilmiah Kegiatan Riset	
10. Biro Perekonomian Setda Prov, Kaltim				0		0		0		0		0			
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang di fasilitasi	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian yang Mendorong Ekonomi yang berkualitas	1)Pemantauan Harga 2)Pemanfaatan data Harga dan Pealporan 3)Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar
		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	90 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			

FORMAT LAMPIRAN III
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 – 2029

Tujuan 1, Terwujudnya Kaltim Sukses,
 Sasaran 1, Akselerasi Perekonomian Daerah

No	Program	Indikator Program	Data Capaian pada Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Output Utama	Ket Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim			223.242.771.403		172.465.008.485		155.085.434.772		126.552.970.027		117.520.275.633			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	44	60	1.010.000.000	60	1.515.000.000	80	2.272.500.000	90	3.408.750.000	100	3.908.750.000	- Pengawasan da Pemerksaan Koperasi Provinsi - Pengawasan Koperasi simpan pinjam	Jumlah koperasi setiap tahun bertambah Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	50	60	1.250.000.000	65	1.375.000.000	70	1.512.500.000	75	1.663.750.000	80	2.100.000.000	- Pendataan Koperasi - Fasilitas Koperasi	Hasil pemeriksaan koperasi adalah menilai koperasi berkualitas/ Tidak Jumlah koperasi Prov 2024: 160 koperasi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wtrausaha (%)	4,86	8,86	25.150.000.000	10,86	26.300.000.000	12,86	21.500.000.000	14,86	21.300.000.000	16,86	1.500.000.000	- Pemberdayaan Kewirausahaan Terpadu "JOSPOL KALTIM PRENEUR"	Sistem SIDT kemenkopUKM Tahun 2024 jml UKM: 72.000 Penambahan 2% setiap tahun
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMMK	Proporsi UKM Menjalih Kemitraan dan Ekspor (%)	24,5	28	1.800.000.000	31,5	2.000.000.000	35	2.200.000.000	38,5	2.400.000.000	42	2.600.000.000	- fasilitas UKM potensial Ekspor	Dim PP 7 Th 2021 ttg kemudahan berusaha, Data UKM Kaltim: 326 (onset 2-15 M) UKM Ekspor 2024: 80 UKM
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	731.789.120	100	804.968.032	100	885.464.835	100	974.011.318	100	1.071.412.449	- Pelaku ekspor yang menggunakan SKA	Fasilitasi SKA dan rekomendasi minuman berakohol
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Dtingkatkan Kualitasnya	21,4	57,1	25.000.000.000	71,5	50.000.000.000	85,7	30.000.000.000	92,84	1.000.000.000	100	1.000.000.000	- Pembangunan Pusat Distribusi Pangan	Kegiatan : Pembangunan 1 Pusat Distribusi Pangan yg rencana beroperasi lh 2027 Tahun 2026 Pembangunan PDP dg usulan anggaran 17 M yg terdiri dari CAS (Controlled Atmosphere Storage), Gudang basah, Gudang kering dan kantor pengelola.
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	1,06	1,06	1.398.000.000	1,06	878.951.087	1,06	966.846.196	1,06	1.063.530.816	1,06	1.169.883.898	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase semakin kecil semakin stabil harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, karena semakin kecil ketergantungan dengan daerah lain
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru (jenis)	28	38	2.500.000.000	43	2.550.000.000	48	2.600.000.000	53	2.650.000.000	58	2.700.000.000	Business Matching, Misi Dagang, fasilitas promosi produk	Outcome kinerja dipilih karena lebih mencerminkan program prioritas peningkatan ekspor non migas non batu bara Kaltim dan lebih tepat pada tupoksi bidang perdagangan
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	4.763.323.821	100	5.001.490.012	100	5.251.564.512	100	5.429.507.281	100	5.789.849.875	- Pengawasan Barang dan Jasa - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen - Sosialisasi Konsumen Cerdas	Tahun 2024: 13 pengaduan, seluruhnya sdh ditindak lanjuti
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	75	80	1.150.380.000	83,3	1.454.079.384	86,6	1.757.778.768	91,6	2.061.478.152	100	2.365.177.536	- Monev Kerjasama antar daerah ke pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran - Fasilitas promosi produk UKM	Jumlah produk UMKM binaan yg masuk pasar 2024: 45 Jumlah produk UMKM yang dbina 2024 : 60
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri (%)		47	67.918.880.000	52	43.497.500.000	57	107.450.000.000	62	167.840.000.000	67	34.640.000.000	- Pengembangan Kawasan Industri - Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Tahun 2024 realisasi investasi sektor industri: 27,81 T Tahun 2024 Target investasi sektor industri : 73,54 T
12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100	1.400.000.000	100	1.440.000.000	100	1.480.000.000	100	1.520.000.000	100	1.520.000.000	- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan IUI, IPUJ, IUKI, IPKI kewenangan Provinsi	Melakukan verifikasi teknis perizinan industri besar PMDN (bukan industri strategis), IKM lntas Kab/Kota Tahun 2023 yang masuk: 8 KBLI ind besar izin yg terbit tahun 2023 : 8 KBLI Disperindagkop hanya memberi rekomendasi, sdgan yang menerbitkan izin adalah DPMTSP

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi secara lengkap, akurat dan terkini (%)	40,32	56,44	1.000.000.000	64,5	1.060.000.000	72,56	1.120.000.000	80,62	1.180.000.000	88,68	1.180.000.000	-diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industry provinsi melalui SINas	Tahun 2023 terdapat Perusahaan industri yang menyampaikan Laporan sebanyak 642 perusahaan Tahun 2024 terdapat Perusahaan industri yang menyampaikan Laporan sebanyak 901 perusahaan
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatian	88,5	89	74.236.313.322	89	75.254.469.982	89	78.681.704.973	89	89.922.557.460	89	85.500.000.000	layanan kesekretariatian pengembangan kompetensi pegawai pemenuhan sarana dan prasarana kantor penganggaran pelaporan	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100					
	UPTD BPSMB														
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMB)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatian	88,5	89	2.868.687.364	89	2945540000	89	2.935.340.000	89	3.407.340.000	89	3.534.000.000	layanan kesekretariatian pengembangan kompetensi pegawai pemenuhan sarana dan prasarana kantor penganggaran pelaporan	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100					
16	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	- Mutu layanan UPTD BPSMB - Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan beraku (%)	(A) 95,43 73,21	(A)95,53 74,21	3.016.000.000	95,58 74,71	3016000000	95,58 75,21	3.048.300.000	(A)95,68 75,71	3.017.045.000	(A)95,73 75,71	3.121.051.750	- layanan sertifikasi dan kalibrasi - Pengujian Komoditi Potensial	-BPSMB telah memiliki standar pelayanan (SP), berdasarkan hasil survey layanan ada beberapa kategori hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): A.Sangat Baik (88,31-100,00) B.Baik (76,61-88,30) C.Kurang Baik (65,00-76,60) D.Tidak Baik (25,00-64,99) - Perhitungan dilakukan dengan menguji sampel/komoditi potensial yang dilakukan oleh petugas. IKK yang mendekati angka 100 menunjukkan produk dari komoditi potensial yang ada di pasar telah memenuhi ketentuan standar yang ditetapkan.
	UPTD PELATIHAN KOPERASI														
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD Pelatihan Koperasi)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatian	88,5	89	6.099.397.776	89	6421000000	89	6.625.000.000	89	6.805.000.000	89	7000000000	layanan kesekretariatian pengembangan kompetensi pegawai pemenuhan sarana dan prasarana kantor penganggaran	
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100					
18	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (UPTD Pelatihan Koperasi)	Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	2	3	1.950.000.000	3,5	2.150.000.000	4	2.300.000.000	4,5	2.450.000.000	5	2550000000	- Fasilitas pelaitan bagi Koperasi dan UKM	Data 2024: Jml koperasi aktif: 2.900 Jml UKM: 72.000 Jml koperasi dan UKM yg dilatih s/d 2024 : 1.511
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim					106.074.435.841		118.349.509.226		127.878.217.246		134.775.986.778		144.068.507.491		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi (Skor)	80,66	85,57	15.561.280.987	88,14	16.873.745.314	90,78	18.481.201.716	93,51	20.409.470.166	96,31	20.534.543.512	1)Pengadaan Ternak Sapi 2)Pengadaan Ternak Kambing/Domba 3)Paket Usaha Unggas Lokal 4)Paket Usaha Unggas Ayam Petelur 5) Luas HPT Unggul	
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Kawasan dan agribisnis (Skor)	87,02	90,54	3.000.000.000	92,35	3.000.000.000	94,19	3.000.000.000	96,08	3.000.000.000	98,00	3.000.000.000		
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijaun Pakan Ternak (Skor)	81,02	85,95	3.680.000.000	88,53	4.085.000.000	91,18	4.270.000.000	93,92	5.050.000.000	96,74	5.190.000.000	*Populasi Ternak/Hewan Yang dilakukan Perawatan *Sapi yang telah mendapatkan Surat Keterangan Layak Bibit *Produksi Bibit/Benh HPT Yang Terdistribusi *Produksi Hijaun Pakan Ternak dan pakan olahan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan (Skor)	94,81	95,76	2.300.000.000	96,24	11.300.000.000	96,72	3.300.000.000	97,20	2.300.000.000	97,69	1.800.000.000	Luas Kawasan peruntukan peternakan	
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH (skor)	91,25	94,97	9.250.000.000	95,47	10.200.000.000	95,97	11.150.000.000	96,47	12.100.100.000	96,97	13.125.000.000	1)Jumlah wilayah terkendali 2)Jumlah pelayanan kesehatan hewan 3)Check poin 4)Lab keswan dan kesmavet	
		Tingkat pengendalian kesehatan veteriner (skor)	87,54	91,08	6.749.500.000	92,90	7.450.000.000	94,76	8.125.000.000	96,65	8.800.000.000	98,58	9.475.000.000	wilayah tidak ada peningkatan kasus GHPR sapi betina yang dipotong di RPH yang telah mendapatkan SKSR/AMPM yang sesuai standar produk pangan segar asal hewan yang diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat NKV atau Sertifikat Pra-NKV	
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (skor)	93,35	94,28	3.000.000.000	94,75	4.000.000.000	95,23	4.600.000.000	95,70	4.600.000.000	96,18	5.500.000.000	*Lat Lab yang dikalibrasi tepat waktu *Penurunan kesalahan hasil uji *Sertifikat hasil uji lab yang tepat waktu	
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan (skor)	75,83	82,02	10.250.000.000	85,30	10.300.000.000	88,71	10.850.000.000	92,26	11.400.000.000	95,95	11.950.000.000	1) Unit usaha yang menerapkan sistem integrasi 2) Jumlah peternak dilatih 3) Pembentukan desa koperasi temak 4) Intervensi infeksi/defeksi	
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan (skor)	83,59	86,96	600.000.000	88,70	600.000.000	90,48	600.000.000	92,28	600.000.000	94,13	600.000.000	PKS sektor peternakan sesuai dengan regulasi yang berlaku	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (Indeks)	91,65	92,57	41.624.106.403	93,03	45.623.786.604	93,50	49.849.939.357	93,56	54.470.615.107	94,43	59.113.696.368	Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) (%)	100	100		100		100		100		Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tidak lanjut)			
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (Indeks)	91,65	92,57	4.163.548.451	93,03	5.012.977.308	93,50	6.229.076.173	93,56	6.398.801.505	94,43	7.080.267.611	Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Lab Keswan & Kesmavet) (%)	100	100		100		100		100		Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tidak lanjut)			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTHPT) (Indeks)	91,65	92,57	8.196.000.000	93,03	11.204.000.000	93,50	10.723.000.000	93,56	7.947.000.000	94,43	8.500.000.000	Kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai aspek layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTHPT) (%)	100	100		100		100		100		Keluhan pengguna layanan yang diterima dan telah diproses dan diberikan respons atau solusi (tidak lanjut)			
3, Dinas Perkebunan Prov. Kaltim					91.420.538.829		88.112.257.171		93.303.720.955		99.728.567.494		102.626.637.079		
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.829.215	20.004.096	15.853.350.076	20.092.114	19.174.990.230	20.180.519	21.167.564.253	20.180.519	23.389.725.979	20.358.499	25.894.103.817	Peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan	
		Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan(%)	n/a	16,67		33,33		50		66,67		83,33		Peningkatan pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	12.460.941	8.000.000	1.497.548.748	8.000.000	1.777.303.708	8.000.000	2.395.034.089	8.000.000	2.093.464.249	8.000.000	1.931.010.674	Peningkatan pengawasan peredaran benih perkebunan	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)	n/a	3,32	4.700.000.000	3,45	4.900.000.000	3,58	5.100.000.000	3,71	5.300.000.000	3,83	5.500.000.000	Pemenuhan ketersediaan benih tanaman perkebunan unggul dan bermutu	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	52.381	44.525	1.243.654.780	40.450	376.903.500	36.750	376.903.500	33.400	376.903.500	30.050	376.903.500	Peningkatan Luasan Areal Perkebunan	
		Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	n/a	12		24		48		72		100		Peningkatan pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	9,69	30,35	2.998.929.120,00	47,76	2.708.701.026,00	65,17	2.605.071.128,00	82,59	2.738.578.241,00	100	2.895.436.065,00	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan	
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	26,5	40,59		55,45		70,3		85,15		100		Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pekebun	
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)	n/a	33,05	3.398.203.798	49,64	3.327.854.014	66,19	3.337.954.707	83,09	3.347.487.815	100	3.410.487.815	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan	
		Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)	18,38	19,62		20,58		21,54		22,5		23,46		Meningkatnya pelaku usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan	
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	90,62	90	1.245.013.210	90	1.369.514.531	90	1.506.465.984	90	1.657.112.582	90	1.739.968.211	Pengendalian Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan	
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	n/a	100	4.940.068.743	100	5.790.678.179	100	6.669.978.179	100	9.387.876.295	100	11.160.648.135	Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Area Perkebunan	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Dinas Perkebunan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	95,77	95,09	38.160.073.674	95,21	39.304.875.884	95,33	40.484.022.160	95,42	41.698.542.825	95,51	42.949.499.110	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PBP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	98,1	97	1.745.074.000	97,3	1.832.327.700	97,6	1.923.944.085	97,9	2.020.141.289	97,9	2.121.148.354	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD P2TP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,8	95	1.822.937.800	95	1.914.084.690	95	2.009.788.925	95	2.110.278.371	95	2.215.792.289	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PBTP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	97,4	97,5	16.814.614.000	97,8	8.343.724.735	97,8	8.332.065.073	98	8.347.034.589	98	5.327.075.174	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Perkebunan) (%)	100	100		100		100		100		100		Penanganan keluhan pengguna layanan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim				25.464.451.739		26.818.029.216		27.293.670.978		27.931.727.058		28.985.247.333		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	372,73	100		100		100		100		100			
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi (skor)	89,10	89,95	1.676.918.602	90,40	1.677.930.656	90,85	1.680.940.000	91,31	1.682.150.000	91,77	1.686.165.000	1) Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi B2SA di Sekolah, Kampus, dan Pesantren di 10 Kab/Kota. 2) Rumah Pangan B2SA di 10 Kab/Kota. 3) Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Pengolahan Pangan Lokal.	
		Skor PPH Ketersediaan (skor)	97,70	97,80	819.321.963	97,85	840.000.000	97,90	840.000.000	97,95	870.000.000	98,00	870.000.000	1) Gerakan Pangan Murah. 2)Rapat Pengendalian Inflasi. 3) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan. 4) Pertemuan Evaluasi Harga Pangan. 5) Rapat Penyusunan NBM. 6)Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan. 7) Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,81	1,90	1.705.909.112	0,95	1.745.000.000	-	1.745.000.000	-	1.765.000.000	-	1.765.000.000	1) Rapat FSVA. 2) Penyusunan FSVA. 3) Koordinasi Pelaksanaan Pengelbaian dan Penyaluran Cadangan Pangan. 4) Sosialisasi/Promosi/Edukasi Gerakan Selamatkan Pangan. 5) Penyusunan SKPG	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	78,20	87		87		87		87		87			
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan (%)	4,89	1,18	250.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.200.000.000	1,18	5.300.000.000	1,18	5.500.000.000	1) Penyediaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan. 2) Gerakan TanamPanen. 3) Koordinasi dan Sinkronisasi 4) Monitoring dan Evaluasi.	
		Peningkatan Produksi tanaman hortikultura (%)	12,33	7,00	7.519.100.453	9,25	7.639.361.911	11,00	8.107.045.359	11,75	8.267.393.070	12,35	8.767.147.140	1) Penyediaan Sarana Pertanian Hortikultura. 2) Sarana Pascapanen. 3) Sarana Pengolahan. 4) Data Produksi Hortikultura. 5) Registrasi Kebun Hortik 6) Montoring dan Evaluasi.	
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD BBI TPH)	Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura (%)	48	53	1.289.017.817	55	1.417.919.599	60	1.559.711.558	65	1.715.682.714	70	1.887.250.986	Perbanyak benih sumber hortikultura	
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	36,31	100	741.381.922	100	815.520.114	100	897.072.125	100	986.779.338	100	1.085.457.271	Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan	
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PSBTPH)	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi (%)	98	100	5.120.314.425	100	1.655.356.501	100	1.390.281.501	100	1.424.421.501	100	1.457.246.501	Sertifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (UPTD PTPH)	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk (%)	37	50		55		60		65		70			
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Pasarana Pertanian	Cakupan Regulasi LP2B yang ditetapkan	4	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	-	1.500.000.000	Perda / Perbup LP2B Kab/Kota	
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat dtangani terhadap luas serangan OPT (%)	74,5	90	3.545.621.855	90	2.932.301.855	90	2.978.981.855	90	3.025.661.855	90	3.072.341.855	1) Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2) Kaj Terap Teknologi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura. 3) Surveillance OPT. 4) Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.	
11	Program Penyaluhan Pertanian (UPTD BPSPDMP)	Persentase Sumber Daya Manusia Penyluh Pertanian yang dtingkatkan (%)	77,00	78,00	1.296.865.590	78,50	1.394.638.580	79,00	1.394.638.580	79,50	1.394.638.580	80,00	1.394.638.580	1) Pelatihan Teknis Pertanian. 2)Bimbingan Teknis Pertanian.	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH) (Indeks)	81,58	82,80	68.652.458.136	83,6	68.805.458.112	84,4	69.305.458.112	85,2	69.800.458.002	86	70.111.458.112	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH) (%)	100	100	1.509.274.537	100	1.603.225.481	100	1.740.415.481	100	1.788.415.481	100	1.788.415.481	Penanganan keluhan pengguna layanan	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH) (Indeks)	82	82,8	3.202.166.670	83,6	3.312.554.670	84,4	3.412.554.670	85,2	3.412.554.670	86	3.554.988.231	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH) (%)	100	100	699.538.323	100	730.538.323	100	782.538.323	100	782.538.323	100	823.447.323	Penanganan keluhan pengguna layanan	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP) (Indeks)	81,58	82,8	3.399.004.379	83,6	3.470.004.442	84,4	3.570.004.442	85,2	3.570.004.442	86	3.666.935.442	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP) (%)	100	100	429.589.446	100	470.558.661	100	520.558.661	100	520.558.661	100	570.558.661	Penanganan keluhan pengguna layanan	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH) (Indeks)	81,58	82,8	1.461.691.242	83,6	1.539.288.000	84,4	1.324.600.000	85,2	1.297.600.000	86	1.605.600.000	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH) (%)	100	100	407.534.332	100	443.850.000	100	465.100.000	100	493.700.000	100	509.200.000	Penanganan keluhan pengguna layanan	
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH) (Indeks)	81,58	82,8	3.387.716.051	83,6	3.405.525.051	84,4	3.480.665.849	85,2	3.480.665.849	86	3.530.443.521	Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH) (%)	100	100	847.350.170	100	899.421.170	100	939.651.170	100	939.651.170	100	989.651.170	Penanganan keluhan pengguna layanan	
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	85,71	4.615.516.124	87,36	5.195.000.000	87,37	5.715.490.000	87,38	6.287.039.000	87,40	6.915.770.000	- Penataan Ruang Laut Kaltim berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTWP Kaltim yang ditetapkan - Pengelbalaan Kawasan Konservasi Perairan berdasarkan Penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang efektif - Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecd, - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecd, terbentuknya Kolompok Penggiat Konservasi dan peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Pesisir	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecd Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitar (KKP3KKD(PS))	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	n/a	100,0		100,0	1.889.151.582	100,0	2.060.056.518	100,0	2.295.932.974	100,0	2.525.560.000		
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	214.694,0	223.367,8	3.835.000.000	227.834,9	4.150.000.000,0	232.391,7	4.560.000.000,0	237.039,5	4.910.000.000,0	241.780,3	8.012.400.000	Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan -Peningkatan sarana dan prasarana di 6 PPI -Penerbitan izin kapal	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan (Ton)	561,0	583,7		595,3		607,2		619,4		631,8	]		
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	241.728,4	258.945,5	8.950.158.964	268.008,6	9.173.912.937	277.388,9	9.347.304.738	287.097,5	9.580.987.357	297.145,9	13.511.710.000	Bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. -Bmtek, pelatihan, sosilasi teknis perikanan budidaya. -Pengembangan inovasi dan teknobgi perikanan budidaya -Pembinaan sertifikasi CPiB, CBIB dan monitoring penyakit ikan	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Ekor)	1.000.000.000	1.100.000.000	2.306.921.432	1.200.000.000	2.364.594.468	1.300.000.000	2.423.709.329	1.400.000.000	2.484.302.063	1.500.000.000	3.850.000.000		
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4.181.000	4.732.250	3.574.128.378	4.840.750	3.500.000.000	4.949.250	3.540.000.000	5.057.750	3.640.000.000	5.166.250	4.004.000.000		
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	100	100	3.395.771.880	100	2.196.466.203	100	2.251.377.858	100	2.307.662.305	100	2.416.150.000	-Meningkatnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan penundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. -Berkurangnya pelanggaran ilegal fishing dan perusakan lingkungan -Terdokumentasinya kepatuhan melalui laporan pengawasan, catatan perizinan yang valid, dan pemenuhan standar operasional	

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)	139.937,0	154.233,4	1.287.402.000	161.882,8	1.072.000.000	169.977,0	1.199.000.000	178.475,9	1.324.000.000	187.399,7	1.456.400.000	Diversifikasi Produk Olahan Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemarkan dan PMT-AS) Diversifikasi Produk Olahan Perikanan, Promosi dan sosialisasi konsumsi ikan (Gemarkan dan PMT-AS)	
		Nlai produk olahan hasil perikanan (Rp)	4.987.154.743	5.803.184.818		6.152.768.866		6.531.188.803		6.978.126.009		7.495.987.647			
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (UPTD PMHP)	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	70	83	439.723.208	86	246.360.021	90	252.519.022	94	258.831.997	98	284.720.000		
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	50.642.283.312	92,6	75.563.968.000	92,8	85.670.715.900	93	96.764.056.695	93,2	98.540.490.000	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 4 dokumen berupa : DPA, RKA, RENJA, LKUIP Proses APBD Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa : 1. Pembayaran gaji dan tunjangan 2. Pembayaran honor pengeblt keuangan 3. Pelaksanaan kegiatan kepegawaian	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100		100		100		100		100		Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	943.023.830	92,6	966.599.426	92,8	990.764.411	93	1.015.533.522	93,2	1.117.100.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	1.519.027.525	100	1.557.003.213	100	1.595.928.293	100	1.635.826.501	100	1.799.450.000		
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD SPAPAL Muara Badak-Sebulu)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	4.090.933.111	92,6	3.960.490.000	92,8	4.097.570.000	93	4.017.570.000	93,2	4.419.360.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	902.907.814	100	1.277.671.000	100	1.178.471.000	100	1.278.471.000	100	1.351.150.000		
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD PMHP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85	92,4	850.184.740	92,6	749.755.198	92,8	766.762.078	93	784.194.130	93,2	837.770.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	88,7	100	512.985.323	100	573.172.456	100	587.501.767	100	602.189.312	100	662.440.000		
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	n/a	92,4		92,6	2.890.370.500	92,8	3.649.296.013	93	3.202.861.288	93,2	354.297.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	100		100	1.548.476.796		1.607.188.695	100	1.668.368.338	100	1.835.240.000		
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil Kepulauan Derawan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	n/a	92,4		92,6	577.078.076		707.983.012	93	844.579.468	93,2	929.050.000		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	n/a	100		100	334.676.150		334.676.150	100	334.676.150,0	100	368.160.000		
6,	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim				511.973.995.346		585.148.295.532		598.398.295.532		609.148.295.532		618.398.295.532		
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu	6.293.432.95	6.402.024,00	47.478.300.186	6.461.888,27	47.478.300.186	6.525.929,11	47.478.300.186	6.594.146,54	47.478.300.186	6.665.844,44	47.478.300.186		
		2, Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1.545	1645	458.366.700	1695	458.366.700	1745	458.366.700	1795	458.366.700	1845	458.366.700		
		3, Jumlah unit pengeblt hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon	1	3	2.000.000.000	4	3.000.000.000	5	4.000.000.000	6	5.000.000.000	7	6.000.000.000		
		4, Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	3,5	4,45	95.000.000.000	4,92	100.000.000.000	5,4	105.000.000.000	5,87	110.000.000.000	6,34	115.000.000.000		
		5, Persentase luas kerusakan kawasan hutan di luar Hutan Konservasi	0,16	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000	<1	41.000.000.000		
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1, Indeks Pengebltan Keanekaragaman Hayati	N/A	0,54	4.200.000.000	547	5.000.000.000	555	5.500.000.000	562	6.000.000.000	569	6.500.000.000		
		2, Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah payungga di KSA/KPA dan	N/A	95337	11.500.000.000	109140	12.500.000.000	115860	13.500.000.000	122580	14.500.000.000	132580	15.500.000.000		

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	1500000000	3250000000	31854000000	3.500.000.000	45000000000	37.500.000.000	45000000000	4.000.000.000	45000000000	4.250.000.000	45000000000		
		2. Luas kawasan yang dikelola masyarakat	330184	370184	5.125.000.000	380184	5.375.000.000	390184	5.625.000.000	400184	5.875.000.000	410184	6.125.000.000		
		3. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	1	3	1.500.000.000	4	3.000.000.000	5	3.000.000.000	6	4.500.000.000	7	4.500.000.000		
		4. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10	12	37.500.000.000	12	39.000.000.000	15	43.000.000.000	15	43.000.000.000	15	43.000.000.000		
4	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1. Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	19886	574628	4.000.000.000	767815	5.500.000.000	843695	7.000.000.000	948076	8.500.000.000	1286457	10.000.000.000		
		2. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,47	9.000.000.000	0,7	9.500.000.000	0,93	10.000.000.000	1,17	10.500.000.000	1,4	11.000.000.000		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85,84	273.966.483.378	86,53	273.966.483.378	87,22	273.966.483.378	87,92	273.966.483.378	88,63	273.966.483.378		
		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268	100	3.870.145.268		
7. Dinas Pariwisata Prov. Kaltim					58.425.780.129		60.820.899.003		65.705.200.800		67.270.708.824		69.350.882.089		
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1,69	2,69	8.625.000.000	3,19	9.050.000.000	4,01	9.475.000.000	4,51	9.900.000.000	5	10.325.000.000		
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	28,56	29,1	7.350.000.000	29,74	7.700.000.000	30,13	9.000.000.000	30,68	9.450.000.000	31,09	12.650.000.000		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3,55	5,07	14.000.000.000	6,08	15.000.000.000	7,09	15.000.000.000	8,11	15.000.000.000	9,12	15.000.000.000		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0,82	1,08	6.000.000.000	1,1	6.500.000.000	1,2	7.000.000.000	1,3	8.000.000.000	1,4	8.500.000.000		
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	82	22.450.780.129	83	22.570.899.003	84	25.230.200.800	85	24.920.708.824	85	22.875.882.089		
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim					80.474.341.319		61.763.780.698		62.832.197.026		64.825.334.987		69.374.832.409		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang melakukan investasi besar (di atas 10 M) (Pelaku Usaha)	N/A	9	5.062.420.000	11	3.812.420.000	13	3.962.420.000	15	4.412.420.000	17	5.800.000.000	1. Penyusunan RUMPD Kaltim 2. Penyusunan Kajian Peta Potensi Investasi Kaltim 3. Pendampingan fasilitasi hirisan investasi strategis	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)	N/A	2	3.592.268.904	2	3.535.559.715	2	3.889.115.686	2	4.278.027.254	3	4.500.000.000	1. Pameran investasi dalam & luar negeri 2. Forum investasi (MIF, One on One Meeting) 3. Publikasi Promosi Digital	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan (Nilai IKM)	93	93,25	6.395.064.400	93,58	7.652.000.000	93,91	7.861.000.000	94,25	8.365.000.000	94,6	9.000.000.000	1. Penyediaan pelayanan perizinan melalui aplikasi OSS dan e-ptsp 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan pelaku usaha 3. Pemantauan lapangan pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan berusaha dan non perizinan	
4	PROGRAM KERJASAMA PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Penanaman Modal yang difasilitasi (Dokumen)	N/A	2	850.000.000	2	885.000.000	2	923.500.000	2	965.850.000	2	1.012.435.000	Pengembangan Kerjasama Intas sektoral (RIRU, BIMP-EAGA)	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan PMPTSP yang Memanfaatkan Sistem Informasi (%)	64	82	1.200.000.300	86	1.400.000.000	91	1.300.000.000	95	1.550.000.000	96	1.650.000.000	Fasilitasi penyediaan data informasi PMPTSP ke publik	
6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha (%)	100	100	2.999.100.513	100	2.521.603.574	100	2.678.763.931	100	2.841.640.324	100	3.000.000.000	1. Pengawasan pelaporan LKPM Pelaku Usaha 2. Press realese nilai investasi Kaltim 3. Fasilitasi pendampingan dan penyelesaian permasalahan pelaporan LKPM	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	91	92	60.375.487.202	93	41.957.197.409	94	42.217.397.409	95	42.412.397.409	97	44.412.397.409		
9. BRIDA Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti (%)	65	67		70		70		72		73			
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim					0		0		0		0		0		
1	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja (%)	65	67		70		70,50		75		80			
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	27,10	28,10		28,60		29		29,60		30			

[illegible]

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										OUTPUT UTAMA	KET Tahun 2026
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13.	Dinas Perhubungan Prov Kaltim				74.299.655.651		277.000.135.433		170.187.701.363		172.055.596.363		158.302.181.363		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76	29.023.782.060	78,3	28.955.705.538	78,7	29.205.705.538	79,07	28.955.705.538	79,44	29.055.705.538		
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	4.901.966.380	100	6.625.606.025	100	5.583.995.825	100	5.780.890.825	100	6.052.475.825		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)	175	155	10.692.384.016	145	71.140.823.870	135	71.120.000.000	125	79.105.000.000	115	85.980.000.000	1. Sosialisasi dan Evaluasi RAK LLAJ Prov. Kaltim 2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perengkapan Jalan (LPJU, Rambu, RPPJ, Marka, Paku Marka, Pagar Pengaman, Deliniator, CCTV) 3. Forum LLAJ; 4. Penegakan Hukum ODOL; 5. Rampcheck Angkutan AKDP; 6. Penyediaan Layanan Sarana Angkutan Umum Massal; 7. Penyediaan Layanan Angkutan Perintis.	
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365.326	435	2.163.977.800	450	68.814.000.000	470	15.714.000.000	485	15.182.000.000	500	4.682.000.000	"1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penutupan Tebing Terminal Tipe B Bonlang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau"	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah distribusi penumpang melalui pelebuhan kewenangan provinsi (Orang)	100.365	118	24.003.567.595	127	31.400.000.000	136	31.400.000.000	145	26.400.000.000	154	26.400.000.000	"1. Rehabilitasi Demaga Tereng, Kutai Barat; 2. DED Demaga Speed depan Klr Gubemur 3. Kajian Pengelolaan Air Sungai di Kalimantan Timur (Mahakam dan Segah) 4. Pembangunan Demaga Speedboat di Depan kantor Gubemur	
		Jumlah distribusi barang melalui pelebuhan kewenangan provinsi (Kg)	19.312	23,4		25,4		27,4		29,5		31,5			
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (%)	40	55	1.350.000.000	65	1.250.000.000	75	1.450.000.000	85	1.450.000.000	95	1.450.000.000	"1. Study FS Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 2. Study Kelayakan KPBU Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 3. Study SID Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 4. Study LARAP Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong 5. Study AMDAL Jaringan Kereta Api Rule Samarinda - Tenggarong"	
	UPTD Terminal														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76		78,3		78,7		79,07		79,44			
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi (Kejadian)													
		Jumlah distribusi penumpang melalui terminal tipe b (Orang)	365.326	435	2.163.977.800	450	68.814.000.000	470	15.714.000.000	485	15.182.000.000	500	4.682.000.000	"1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B Paser 2. Pengadaan Pagar dan Penutupan Tebing Terminal Tipe B Bonlang 3. Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang 4. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pagar Terminal Tipe B Sangatta 5. Rehabilitasi Terminal Tipe B Berau"	
14.	Dinas Sosial Prov Kaltim				0		0		0		0		0		
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	5000 orang	4500 orang		4500 orang		4000 orang		3500 orang		3500 orang			
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	50%	60%		65%		70%		75%		80%			

[illegible]

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

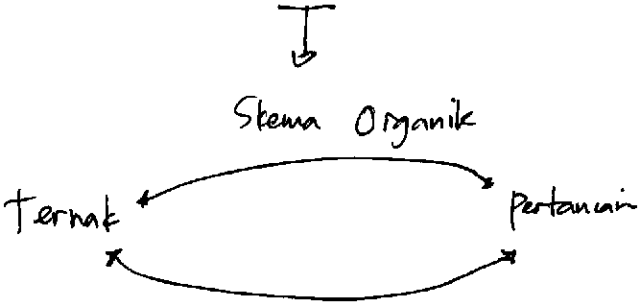
NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
Sudarno	Tim Transisi	1. Terkait dengan tingkat inflasi penyumbang tersebar adalah pemasokan pangan, seharusnya terkait dengan pasokan pangan bisa lebih dijaga untuk standarisasi harganya. 2. Perlu adanya peningkatan produksi dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. 3. Perlu dilakukan pertemuan dengan pemasok dalam mengendalikan harga pangan.
Zaini	Tim Transisi	1. Perlu menyelaraskan program gratispoll dan jospol untuk masuk ke perencanaan daerah, dan memastikan Perangkat Daerah mendukung program gratispoll dan jospol yang sdh disusun. 2. Kegiatan Perangkat Daerah dilingkup pertanian untuk Jospol 1 adalah mendukung hilirisasi, yang harus dipersiapkan adalah sisi hulunya yaitu dengan peningkatan produksi. Karena indikator kinerjanya adalah produktivitas. 3. Meningkatkan produksi perlu 2 hal yng dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam arti luas dan serta perluasan areal tanam, dimana untuk kegiatan Jospol belum ada memasukkan kegiatan tersebut, termasuk di dinas perkebunan tidak ada kegiatan untuk Jospol 1. 4. Dinas perindustrian perlu melaksanakan kegiatan terkait bagaimana cara melakukan pengembangan Kawasan-kawasan industry 5. Terkait dengan perikanan, untuk mendukung IBEI Berapa anggaran untuk peningkatan produksi ? jika bisa dioptimalkan sesuai dengan kewenangan provinsi. 6. TIPD Untuk dapat di proyeksikan berapa persen kemampuan dalam mengendalikan Inflasi. 7. BRIDA Perlu membuat Blue Print / Road Map untuk penelitian Daerah.
Anwar Saleh	Tim Transisi	1. Masalah batas kawasan hutan bisa smpai ke tingkat Tapak. 2. Pengembangan hutan rakyat dipastikan untuk dapat terdaftar dan memperoleh bantuan dari pemerintah. 8. pengelolaan DAS mahakam untuk transportasi publik perlu diperhatikan. dengan melakukan degradasi eks mahakam untuk mengurangi resiko bencana lingkungan
Ujang Rachmad	Asisten II	1. Kegiatan untuk Peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis modern Tidak masuk ke dalam Jospol 1. 2. Pastikan program dan kegiatan perkebunan untuk memasukkan kegiatan prioritasnya ke dalam jospol. 3. Perangkat Daerah untuk dapat mengusulkan ke Bappeda yang masuk ke Jospol untuk kegiatan peningkatan Produksi. 4. Asosiasi/mitra pembangunan dapat berkunjung ke Perangkat Daerah terkait untuk melakukan Forum diskusi khusus.

NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
		- Perangkat daerah untuk dapat membuat usulan serta argumentasinya yang dimasukkan ke JOSPOL 1. - Perangkat daerah untuk Menyiapkan matriks usulan disertai anggaran. Dan disampaikan ke bappeda untuk dilakukan rapat koordinasi kembali membahas usulan tersebut.
Hasrun Jaya	GPEI	- keberlanjutan kualitas lahan Pertanian dan Perkebunan sebaiknya kita mulai mengarahkan kepada skema organik ramah lingkungan, selain untuk mendukung kualitas hidup Masyarakat dengan mengkonsumsi hasil pangan (Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan) yang sehat. - Potensi Kaltim adalah lahan yang tidak digunakan. disarankan lahan tersebut bisa dibudidayakan untuk pertanian dan perkebunan. - Perlu di kembangkan skema pertanian organik. - Perlu dibuat skema bagaimana kebutuhan pasar diluar negeri agar bisa terpenuhi dan bagaimana transformasi energi bisa dilaksanakan. - Perlu dipikirkan kembali terkait penangkapan ikan, karena banyak nelayan yang menangkap ikan diluar wilayah kaltim dikarenakan perairan di kaltim kritis. - Perdagangan Kaltim akan meningkat jika komoditi dan manufaktur dikembangkan selagi PAD disektor Batubara dan migas masih besar, sehingga sektor yang bisa mensuplay kebutuhan sektor lainyang sangat minim - Produksi ikan dan potensi laut (hewani) akan meningkat jika Pemerintah aktif membangun Infrastruktur rekayasa habitat ikan/udang dll dilaut akibat kerusakan terumbu karang (aktifitas alur pelayaran, metode tangkap illegal-bom, racun, pukat, dll) dan lemahnya pengawasan dan penanganan dari aparat terkait (Penegakan hukum)
Adung	HPDKI	- Di Kaltim kekurangan pasokan daging, blm adanya kawasan khusus peternakan serta tertinggalnya kelembagaan peternakan. - Ada Potensi peternakan domba untuk menggantikan komoditi Sapi. - Dilakukan evaluasi untuk komoditas sapi yang dijadikan major project oleh Dinas Peternakan apakah populasinya dari tahun ke tahun bertambah atau tidak. - Belum ada peraturan terkait perlindungan lahan peternakan. - Perlunya peningkatan SDM Peternakan yang di ikuti oleh keterjaminan penyerapan hasil. - Fokuskan pada pembangunan peternakan kawasan untuk komoditi yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat
Jumri	DEKOPINWIL	- Mengenai inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di harapkan masuk dalam Renstra dan Renja yang dilampirkan target pembangunan. - Koperasi indo memiliki dokumen bisa digunakan sebagai masukan untuk dokumen RPJMD
Fahmi	DPMPTSP	KEK maloy tidak ada cantolan sub kegiatan sehingga untuk pembangunannya akan dilakukan dimana? Karena

NAMA	INSTANSI	SARAN DAN MASUKAN
		adanya kawasan industri sangat berpengaruh dalam peningkatan LPE 2. Terkait Pariwisata untuk dapat lebih dikembangkan kembali untuk meningkatkan investasi
Warsito	Disprindakop	1. Intervensi untuk kawasan industri adalah kariangau, kegiatan 2026 ada kajian perpres untuk buluminung pengadaan lahan seluas 8 Ha 2. Kawasan Kariangau tahun 2027 penyusunan DED, Amdal, dan andalalin
Fitriansyah	BRIDA	Geopark menjadi program nasional sehingga kaltim harus bisa mengikuti dan sudah disiapkan calon geopark di kaltim.
Ika Ayu	BPS	1. Ekonomi kaltim tercatat sudah tinggi di posisi 8 PDRB Nasional 2. Perlu penambahan PDRB sebesar 50 T untuk bisa menambah pertumbuhan sampai 6% 3. Investasi kaltim saat ini yang mensupirt pertumbuhan ekonomi adalah IKN 4. Kaltim masih dominan di tambang. 5. Penurunan kontribusi tambang dikarenakan harga tambang yang turun. 6. Investasi di kaltim tinggi dipengaruhi oleh pembangunan di IKN
Daniel	IAP Kaltim	Perihal Belum ada kemantapan kesesuaian program utama antar OPD, yaitu korelasi kaltim sebagai lokasi nasional hirilisasi berbagai komoditi (kelapa sawit, Kelapa, rumput laut, nikel, timah, bauskit, tembaga) dengan pembangunan serta pengelolaan kawasan industri di Kaltim dan program insentif investasi di bidang-bidang tersebut (untuk Jospol 1 dan 2). Dan Juga perlu keselarasan lokasi industri, program pengurai penghambat pengembangan kawasan industri dan turunannya dengan kesesuaian ruang.
KTNA	KTNA Kaltim	1. Dalam paparan OPD Pertanian dan Perikanan belum ada Indikator Renstra perangkat Daerah dalam meningkatkan produktivitas 2. Perlunya inovasi dihulu dan dihilir untuk pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kaltim

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	Hasrun Jaya	GPEI Kaltim	- Keberlanjutan kualitas lahan pertanian & perkebunan sebaiknya kita mulai mengarahkan kepada skema organik ramah lingkungan. Selain untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dgn mengkonsumsi hasil pangan (pertanian, peternakan, perkebunan) yang sehat. "Sesungguhnya apapun tanah kita, jika tiap tahun diberi pupuk kimia, maka kualitas tanah kita akan sangat kritis"  <pre> graph TD A[Skema Organik] --> B[Pertanian] B --> C[Ternak] C --> A </pre> - Best business ^{low} perdagangan Kaltim akan meningkat jika komoditas dan manufaktur dikembangkan, "mumpang" PAD di sektor batubara, migas masih besar sebagai sektor yang bisa mensuplai kebutuhan sektor lain yang sangat milih. - produksi ikan dan potensi laut (hewan). akan meningkat jika pemerintah aktif membangun infrastruktur rekayasa habitat ikan/udang dll dilaut akibat kerusakan Terumbu Karang (aktifitas Alur pelayaran, metode tangkap ilegal - Bom, Racun, pukat dll)

dan lemahnya pengawasan dan penanganan dari Aparat terkait. (kepastian hukum & penegakan hukum).

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	JUMRI	DEKOPINWIL KALTIM	Untuk Rencana Strategis Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu masukan untuk Penyempurnaan Rencana & Kerja Pembangunan Kalimantan Timur 2) Inpres no 9 tahun 2025 mengenai Pemberian Koperasi Merah Putih dibarengkan dengan dalam Rencana & Kerja yg dibarengkan target Pembangunan, meliputi yg akan, sudah dan Berencana 3) Hasil-hasil monitoring Subjekan yg tidak bisa Masyarakat Kalimantan Timur ini dapat digubuhkan. Karena tidak ada dari Masyarakat Kalimantan Timur 4) Perubahan Nilai Tukar Petani (NTP) Faktor Stoving → Pemasukan yg akan berguna bagi Masyarakat. K.S → Dang V.

FORMAT LAMPIRAN IV

SARAN DAN MASUKAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Nama	Instansi	Saran & Masukan
1	Adungks Utomo	HPDKI Kaltim	1. Fokuskan pd pembangunan peternakan kawasan untuk komoditi yg lebih mudah di bangunkan dan lebih me-nyantun langsung pd masyarakat. 2. Peningkatan sdm peternakan harus di barengi dg keterjiminan penyerapan hasil.

Formulir E.29

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila Tidak Ada
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah Provinsi.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah provinsi.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPD	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√			

Samarinda, 19 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA


 Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi, M.Si
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

 Fahmi Hingawan, S.T., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 197412162006041006

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal Tiga bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Lima**, bertempat di **Ruang Kepala Bidang PSDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur** telah dilaksanakan verifikasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2026 antara Tim Verifikasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil Verifikasi sebagai berikut :

- I. Sistematika penyajian **Sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.) sebagaimana berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Catatan :

- 1. Berdasarkan pencermatan dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, masih terdapat ketidaksesuaian nomenklatur.

- II. Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rankhir Renja PD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Penelaahan	Terpenuhi / Tidak Terpenuhi	Keterangan
1	Seluruh Program RKPD digunakan pada Renja PD	Terpenuhi	

No	Penelahaan	Terpenuhi / Tidak Terpenuhi	Keterangan
2	Seluruh Kegiatan RKPD digunakan pada Renja PD	Terpenuhi	
3	Seluruh Sub Kegiatan RKPD digunakan pada Renja PD	Terpenuhi	
4.1	Indikator kinerja Program, pada Renja PD sama dengan yang digunakan pada RKPD	Terpenuhi	
4.2	Indikator kinerja Kegiatan pada Renja PD sama dengan yang digunakan pada RKPD	Terpenuhi	-
4.3	Indikator kinerja Sub Kegiatan pada Renja PD sama dengan yang digunakan pada RKPD	Terpenuhi	
5.1	Target kinerja Program pada Renja PD sama dengan target RKPD	Terpenuhi	
5.2	Target kinerja Kegiatan minimal sama dengan target RKPD	Terpenuhi	
5.3	Target kinerja Sub Kegiatan pada Renja PD minimal sama dengan target RKPD	Terpenuhi	

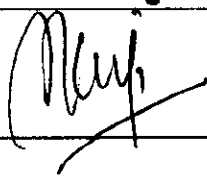
- III. Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang telah diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi segera disampaikan ke Bappeda paling lambat tanggal **7 September 2025**.

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini dibuat, untuk dapat ditindaklanjuti.

Tim Verifikasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agustina Rahmawati, S.Pt.	Perencana Ahli Muda	

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rofik, S.Pt., M.P	Perencana Ahli Muda	

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009